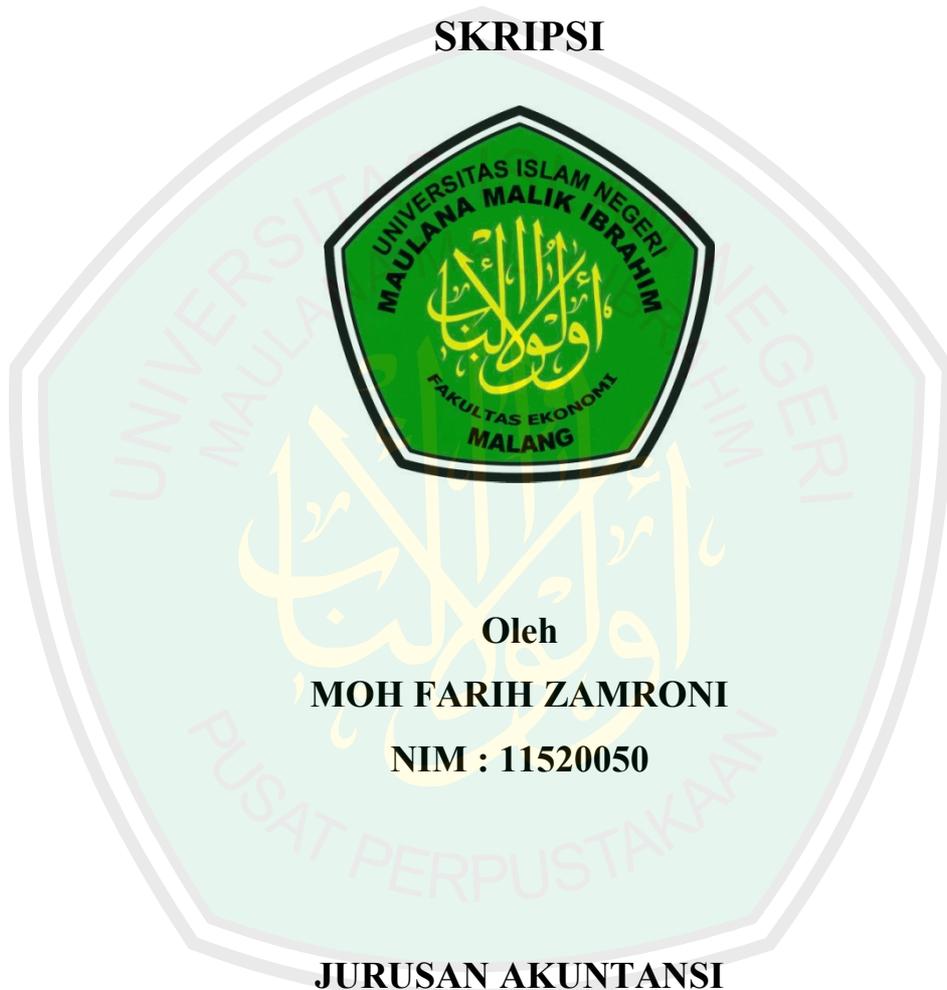


**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DALAM
PERSPEKTIF PSAK NOMOR 45 DI
YAYASAN DARUL MUSTAGHITSIN**

SKRIPSI



Oleh

MOH FARIH ZAMRONI

NIM : 11520050

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2015

**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DALAM
PERSPEKTIF PSAK NOMOR 45 DI
YAYASAN DARUL MUSTAGHITSIN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

MOH FARIH ZAMRONI

NIM : 11520050

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2015**

**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DALAM
PERSPEKTIF PSAK NOMOR 45 DI
YAYASAN DARUL MUSTAGHITSIN**

SKRIPSI



Oleh

MOH FARIH ZAMRONI

NIM : 11520050

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2015

**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DALAM
PERSPEKTIF PSAK NOMOR 45 DI
YAYASAN DARUL MUSTAGHITSIN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

MOH FARIH ZAMRONI

NIM : 11520050

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2015**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
DALAM PRESPEKTIF PSAK NOMOR 45 DI
YAYASAN DARUL MUSTAGHITSIN

SKRIPSI

Oleh

MOH FARIH ZAMRONI

NIM : 11520050

Telah disetujui pada tanggal 04 Nopember 2015

Dosen Pembimbing,



Yona Octiani Lestari, SE., MSA
NIP. 197710252009012006

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



Nanik Wahyuni, SE., Ak., CA
NIP. 197203222008012005

LEMBAR PENGESAHAN
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DALAM
PERSPEKTIF PSAK NOMOR 45 DI
YAYASAN DARUL MUSTAGHITSIN
SKRIPSI

Oleh

MOH FARIH ZAMRONI

NIM : 11520050

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 13 November 2015

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji
Niken Nindya Hapsari, SE., MSA., AK., CA

Tanda Tangan

:()

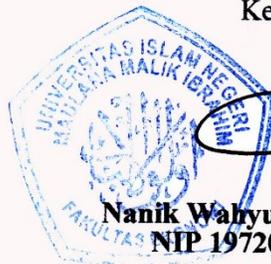
2. Penguji Utama
Zuraidah, SE., MSA
NIP 19761210200912 2 001

:()

3. Dosen Pembimbing
Yona Octiani Lestari, SE., MSA
NIP 19771025200901 2 006

:()

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,



Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Farih Zamroni
NIM : 11520050
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa **“Skripsi”** yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF PSAK NOMOR 45 DI YAYASAN DARUL MUSTAGHITSIN** adalah hasil karya saya sendiri, bukan **“duplikasi”** dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 04 November 2015
Hormat saya,

Moh Farih Zamroni
NIM : 11520050

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Penyusunan Laporan Keuangan Dalam Perspektif PSAK Nomor 45 di Yayasan Darul Mustaghitsin”

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kesesatan menuju jalan kebenaran, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

Bapak Prof. Dr. Mudjia Rahardjo, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dr. H. Salim Al Idrus. MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nanik Wahyuni, SE., M.SA., Ak., CA , selaku ketua jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Yona Octiani Lestari.,SE.,MSA , selaku dosen pembimbing skripsi.

Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Bapak, Ibuk, Adik dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan

do'a dan dukungan secara moral

Guru-guru spiritual, yang selalu membimbing serta mengarahkan rohani demi mencapai keberkahan ilmu.

KH Mas'ud Al Mudjenar, Selaku Pimpinan Yayasan Pesantren Darul Mustaghitsin Lamongan yang telah memberikan izin untuk penelitian skripsi ini dan selalu mensupport.

Seluruh komponen Yayasan Pesantren Darul Mustaghitsin Lamongan yang telah mebanu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dan selalu mensupport.

Sesosok misterius yang mampu mensupport meski tidak secara langsung.

Sedulur kontrakan mertojoyo yang memberikan sejuta kenangan yang tak mungkin terlupakan.

Sedulur Forum Komunikasi Mahasiswa Akuntansi 2011 yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak.

Malang, 04 November 2015

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDULi

HALAMAN PERSETUJUANii

HALAMAN PENGESAHANiii

HALAMAN PERNYATAANiv

HALAMAN PERSEMBAHANv

HALAMAN MOTTOvi

KATA PENGANTARvii

DAFTAR ISIviii

DAFTAR TABELix

DAFTAR GAMBARx

DAFTAR LAMPIRANxi

ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang1

1.2 Tujuan Rumusan Masalah7

1.3 Batasan Masalah8

1.4 Tujuan Penelitian8

1.5 Manfaat Penelitian9

BAB II KAJIAN PUSTAKA10

2.1 Penelitian Terdahu10

2.2 Landasan Teori12

2.2.1 Pengertian Organisasi Nirlaba12

2.2.2 Karakteristik Organisasi Nirlaba.....13

2.2.3 Standar Akuntansi Keuangan.....18

2.2.4 Pencatatan Jurnal Standar Pada Organisasi Nirlaba.....21

2.2.5 Laporan Keuangan Entitas Nirlaba	24
2.3 Kerangka Berpikir	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian.....	38
3.2 Data dan Jenis Data.....	38
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.4 Metode Analisa	31

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data.....	43
4.1.1 Latar Belakang Yayasan.....	43
4.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan.....	44
4.1.3 Struktur Organisasi.....	45
4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan Yayasan.....	47
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	49
4.2.1 Laporan Posisi Keuangan.....	50
4.2.2 Laporan Aktivitas.....	54
4.2.3 Laporan Arus Kas.....	65
4.2.3 Catatan Atas Laporan Keuangan.....	67

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

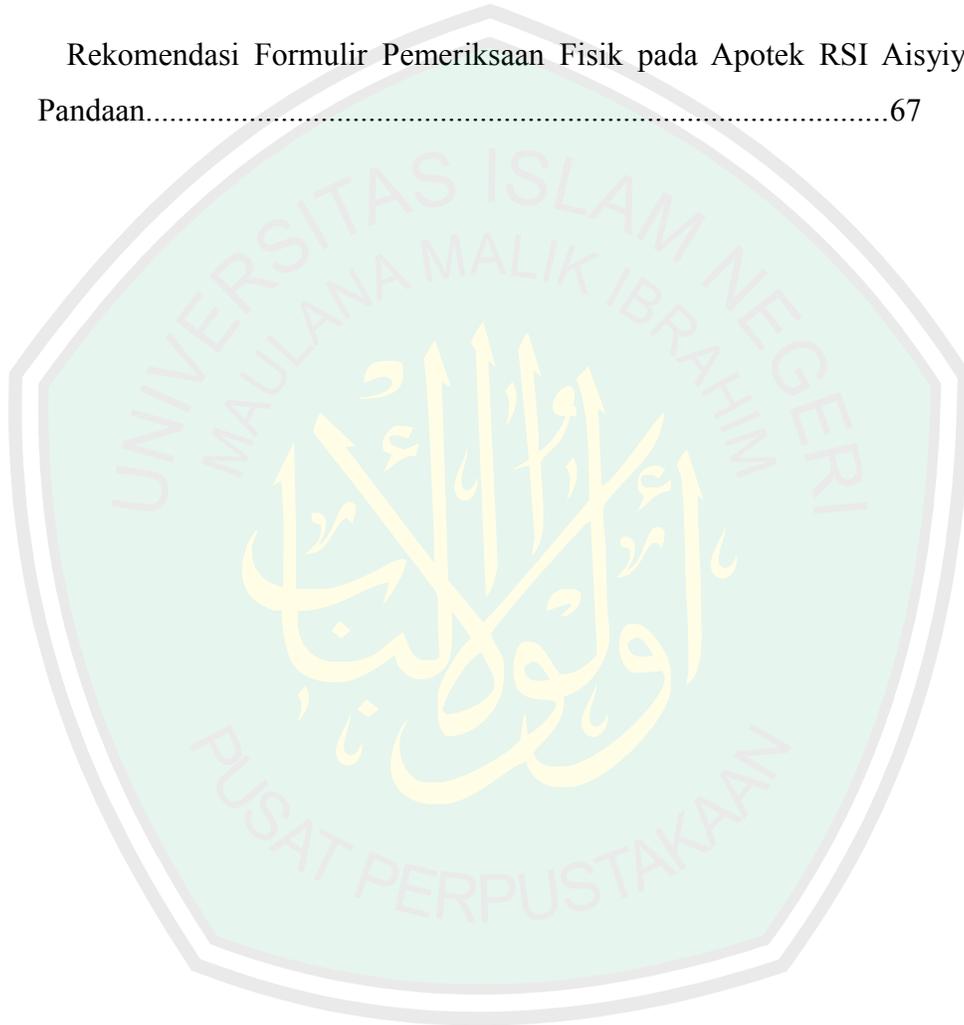
DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1.Kerangka Berfikir.....	34
Gambar	4.1.Struktur Organisasi.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	9
Tabel 4.1 Kelompok Kode Rekening.....	57
Tabel 4.2 Rekomendasi Formulir Pemeriksaan Fisik pada Apotek RSI Aisyiyah Cabang Pandaan.....	67



DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra, 2005, *Akuntansi Sektor Publik : Satuan Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Bastian, Indra., 2007. *Akuntansi Pendidikan*, Jakarta : Penerbit Erlangga.

Carter, K. William., 2009, *Akuntansi Biaya*, Edisi 14, Buku 1, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Halim, Abdul., 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Syafri Sofyan, 2007, *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi, Penerbit PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Kieso, E. Donald, Jerry J. Weigant, dan Terry D. Warfield., 2007, *AkuntansiIntermediate, Edisi Keduabelas*, Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Nainggolan, Pahala., 2005, *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*, Penerbit PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati, 2007, *Akuntansi Pemerintah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Warren, S. Carl., James M.Reeve, dan Philip E. Fees, 2008, *Pengantar Akuntansi*, Buku Satu, Edisi 21, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Winarni, F., dan G., Sugiyarso, 2001, *Konsep dasar dan Siklus Akuntansi*, Penerbit Media Presindo, Yogyakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia, Per 1 Juli 2009, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Jakarta : Penerbit Erlangga

Beams, Floyd A. 2000. *Akuntansi Keuangan Lanjutan. Edisi Keenam. Diterjemahkan Oleh Amir Abadi Yusuf.* Jakarta : Salemba Empat.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45, Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.* Indonesia Ikatan Akuntansi Indonesia.

Wiwin Yaadiati. 2007, *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Pertama Jakarta: Prenada Media Group.

Harahab, Sofyan Syahri. 2012, *Teori Akuntansi – Edisi Revisi 2011* Cetakan Keduabelas. PT. Radjagrafindo Persada. Jakarta.



ABSTRAK

Moh Farih Zamroni. 2015, SKRIPSI. Judul: “Penyusunan Laporan Keuangan Dalam Perspektif PSAK Nomor 45 di Yayasan Darul Mustaghitsin”

Pembimbing : Yona Octiani Lestari.,SE.,MSA

Kata Kunci : Laporan Keuangan, PSAK 45, Yayasan

Sejalan dengan perkembangan masyarakat, berkembang pula organisasi yang disebut organisasi nirlaba, Pada umumnya organisasi jenis ini menekankan pada pelayanan sebaik-baiknya pada pihak eksternal, misalnya organisasi pelayanan kesehatan, pendidikan, layanan sosial dan keagamaan. Kemampuan organisasi untuk terus memberikan jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai asset kewajiban, aset bersih, dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut. Organisasi nirlaba perlu memperhatikan laporan keuangannya yang berguna untuk menilai kemampuan organisasi nirlaba yakni jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut serta cara manajer melaksanakan tanggungjawabnya terhadap kinerja Yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan laporan keuangan lembaga nirlaba untuk mengetahui bagaimana kinerja pengelola dalam suatu periode. Dengan latar belakang itulah penelitian ini dilakukan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis tentang penyusunan laporan keuangan lembaga nirlaba untuk mengetahui kinerjanya. Analisis data bertujuan untuk merumuskan sebuah format laporan keuangan berdasarkan PSAK 45. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentansi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat komponen laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standart yang berlaku umum bahkan belum tersajikan. Sehingga peneliti mencoba membuat format laporan keuangan lembaga nirlaba berdasarkan PSAK 45 yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana kinerja pengelola dalam suatu periode

ABSTRACT

Zamroni, Moh Farih. 2015, THESIS. Title “The Financial Report Based on Perspective SFAS 45 at Yayasan Darul Mustaghitsin”

Advisor : Yona Octiani Lestari., SE., MSA

Keywords : Financial Report, SFAS 45,

As society develops, a nonprofit organization is also developing. Generally, such organization emphasizes on its best service for external parties, such as organization of health, education, social and religious services. The organization capability to continue providing services is communicated using financial statement. It provides information about the mandatory asset, net assets, and the relationship between the two elements. Non-profit organizations have to pay more attention to their financial statements which is useful to assess their capabilities and their continuance in providing services and the managements in carrying out their performance. This study aims to find out the process of non-profit institution financial statements making and to determine the manager's performance in a certain period. Therefore, this researcher conducted a study entitled "The Implementation of Financial Statements Making in Non-Profit Institutions Based on SFAS 45".

This study uses a descriptive qualitative approach to systematically describe the preparation of non-profit institution financial statements to determine its performance. Data analysis aims to formulate a financial statement format based on SFAS 45. The researcher collects the data using interview, observation, and documentation.

The results shows that some components of financial statements are not based on the generally accepted standard and some of them are not presented yet. Therefore, the researchers tries to make the standard format of non-profit institution financial statement based on SFAS 45 to determine the manager's performance in the following period.

مستخلص البحث

محمد فاريح زمرا ني، ٢٠١٥. إعداد السجل المالي من منظور PSAK 45 في الأساس دار المستغنين.

المشرف : يون أك ت ياني لستاري الماجستير.

الكلمات الأساسية : السجل المالي و PSAK 45.

يتطور المنظمة التي سميت بمؤسسة NIRLABA مع تطور المجتمع. وبشكل عام، يسدد هذا النوع من التنظيم على أفضل الخدمات الجانب كمؤسسات الصحية والتعليم والإجتماعي والديني. وقدرة المنظمة على مواصلة تقديم الخدمات ترسل من خلال بيانات المركز المالي الذي يوفر معلومات حول الأصول وخصوم وصافي الأصول والمعلومات عن العلاقة بين هذه العناصر. لا بد المنظمة NIRLABA أن تنظر السجل المالي الجيد لتقويم قدرة المنظمة NIRLABA أي تقدم هذه الخدمات، وكيفية تنفيذ مسؤوليات مدير الأداء المنظمة. أما الهدف من هذا البحث هو معرفة عملية إعداد البيانات المالي ومعرفة كيفية أداء المدير. إنطلاقاً من ذلك، اختار البحث الموضوع: تنفيذ كتابة السجل المالي في مؤسسة NIRLABA نظراً على PSAK 45

استخدم الباحث المنهج الكيفي الصفي. والهدف من هذا البحث هو أن يصف منهجي حول إعداد القوائم المالية في مؤسسة NIRLABA. وتحليل البيانات هدفاً لوضع السجل المالي على سبيل. وأما جمع البيانات بالمقابلة والملاحظة والوثائق. ونتيجة هذا البحث هي أن عنصر السجل المالي غير مناسبة كما لا يرام. لذلك، يحول الباحث أن يكتب شكل البيانات المالية الذي يمكن استخدامه لمعرفة عمل مدير الأداء في المستقبل.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan standar akuntansi di Indonesia sangatlah pesat. Pada tahun 2012, ditargetkan terdapat empat pilar standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, antara lain: SAK Umum yang terdiri dari PSAK berbasis IFRS dan PSAK Non IFRS (syariaah), SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Standar Pelaporan Keuangan untuk Entitas Nirlaba.

Pengaturan atas ketiga standar yang disebutkan pertama sangatlah jelas untuk diterapkan dan konsisten untuk entitas laba atau profit. Terkait untuk entitas nirlaba yang dapat dikatakan penerapan atas standar pelaporan keuangan untuk entitas nirlaba hanya memberikan pedoman atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, perihal pengakuan, pengukuran, dan penilaian harus mengacu kepada standar lainnya.

Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan atas laporan keuangan entitas nirlaba yakni penerapan standar manakah yang dapat digunakan perihal pengakuan, pengukuran, serta penilaian (pengukuran lanjutan) transaksi-transaksi yang dilakukan serta pertanyaan selanjutnya apakah laporan keuangan entitas nirlaba adalah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Jika dikaitkannya atas konvergensi IFRS yang semakin marak dalam beberapa tahun terakhir ini, dimana seperti yang telah diketahui bahwa tahapan puncak atas

konvergensi terjadi pada tahun 2012 ini, maka salah satu PSAK yang disesuaikan dengan konvergensi IFRS tersebut adalah PSAK 45 terkait dengan Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, dimana peraturan ini telah dibuat pada Oktober 2010, dan berjalan efektif pada 1 Januari 2012.

Berdasarkan perubahan ini maka akan memberikan dampak terhadap penyajian dan pengungkapan, laporan keuangan organisasi nirlaba. Adapun perubahan yang terjadi secara spesifik adalah dalam hal ruang lingkup dan acuan untuk pengaturan yang tidak diatur. Ruang lingkup dalam PSAK 45 yaitu lembaga pemerintah dan unit sejenis lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang lingkup yang dimiliki oleh PSAK 45 menjadi lebih jelas dan spesifik, jika dibandingkan dengan PSAK 45 (1997). PSAK 45 (1997) tidak berlaku dalam lembaga pemerintah, departemen, dan unit-unit sejenis lainnya. Di sisi lain, terkait dengan acuan untuk pengaturan yang tidak diatur, dimana berdasarkan PSAK 45 antara lain: SAK dan SAK ETAP(dahulu SAK ETAP belum digunakan sebagai acuan). Hal ini dikarenakan pada PSAK 45 yang diatur hanya terkait dengan penyajian dan pengungkapan laporan keuangannya saja sehingga untuk pengukuran, penilaian, pengakuan masih harus diatur oleh standar-standar lainnya yakni SAK dan SAK ETAP. Hal ini sesuai dengan pernyataan pada PSAK 45 dalam paragraf 4, yaitu “Pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan entitas nirlaba. Pengaturan yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada SAK, atau SAK ETAP untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan”.

Hingga saat ini Indonesia belum mempunyai suatu standar khusus yang berlaku rinci terkait dengan organisasi nirlaba, walaupun telah dinyatakan secara teoritikal bahwa PSAK 45 merupakan standar bagi organisasi nirlaba. Keterbatasan ruang lingkup serta acuan pengaturan membuat penerapan atas standar ini tidak berjalan efektif (hanya bersifat teoritikal) hingga IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan *exposure draft* atas standar bagi organisasi nirlaba yang kemudian menjadi PSAK 45 yang dijalankan secara efektif pada 1 Januari 2012. Standar bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, dalam hal ini awalnya berdasarkan PSAK 45 (1997) yang berlaku adalah SAK Umum. Namun, kini secara spesifik atas organisasi nirlaba yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik diatur berdasarkan dengan SAK ETAP (melakukan penerapan atas SAK ETAP).

Perkembangan peraturan dan standar yang semakin lengkap dan kompleks atas organisasi nirlaba, dapat dijadikan sebagai bukti bahwa keberadaan organisasi nirlaba dalam tatanan perekonomian adalah signifikan dan memiliki dampak. Dampak positif yang diharapkan atas adanya revisi PSAK 45 tersebut, adalah laporan keuangan organisasi nirlaba semakin relevan, memadai, lebih mudah dipahami, dan memiliki daya banding yang tinggi. Namun, di sisi lain tidak dapat dipungkiri pula bahwa dengan adanya perubahan atas peraturan tersebut dapat menyebabkan suatu konflik baru yaitu apakah perubahan yang ada dapat tetap membuat kesesuaian atau sebaliknya ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan standar-standar yang berlaku, antara lain: SAK Umum, SAK ETAP, dan PSAK 45. Perlu dilakukan

analisis terhadap kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar yang berlaku, guna menjaga dan memenuhi esensi atas laporan keuangan dan standar (PSAK). Serta sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku yakni UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, pada pasal 52 ayat 1,2,3 yang menyatakan:

Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.”

Ayat 2 menyatakan bahwa “Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang :

- a. memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau
- b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.

Ayat 3 menyatakan bahwa “Laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diaudit oleh Akuntan Publik.”

Secara aktual, kondisi yang terjadi tidaklah sesuai dengan aturan yang diungkapkan pada undang-undang tersebut, berdasarkan penentuan objek penelitian yang akan dilakukan, pada umumnya organisasi nirlaba yang ada di Indonesia cenderung tertutup sehingga akses untuk memperoleh informasi perihal keuangan yang dimiliki tidaklah mudah. Hal ini menyebabkan pro kontra sehingga signifikan

untuk diketahui lebih lanjut terkait dengan laporan keuangan yang dimiliki oleh entitas nirlaba.

Adapun objek yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu berupa yayasan yang memiliki transparansi sehingga pencatatan atas jurnal, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan atas laporan keuangan yang dimiliki dapat diketahui dan diberikan rekomendasi agar laporan keuangan yang dimiliki sesuai dengan penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Laporan keuangan yang dimiliki oleh objek penelitian yakni Yayasan Darul Mustaghitsin telah disajikan dan diungkapkan secara rutin dari periode 2013, namun laporan keuangan ini belum pernah diaudit/dilakukan pemeriksaan baik terhadap kewajaran atas saldo yang dimiliki maupun kepatuhan terhadap penerapan standar yang berlaku. Sehingga, penyajian dan pengungkapan atas akun dalam laporan keuangan yang dimiliki belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian perlu dilakukan analisis lebih lanjut perihal pengakuan, pengukuran, penilaian (pengukuran lanjutan) yang menjadi satu kesatuan saling terkait satu sama lainnya.

Analisa atas kerangka dasar akuntansi dapat memberikan esensi lebih atas laporan keuangan yang dimiliki oleh Yayasan Darul Mustaghitsin terutama dalam penerapan standar akuntansi sehingga patuh dan memiliki akuntabilitas. Pengembangan wawasan atas standar akuntansi terkait pelaporan keuangan untuk entitas nirlaba menjadi salah satu hal lainnya yang ingin dicapai oleh Yayasan.

Dengan demikian, bertolak dari penelitian atas kepatuhan penerapan atas standar akuntansi serta akuntabilitas yang ingin dicapai oleh Yayasan, serta didukung dengan faktor transparansi yang dimiliki maka Yayasan Darul Mustaghitsin menjadi objek penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini untuk melihat kepatuhan dan dampak yang ditimbulkan bilamana penerapan standar pelaporan keuangan entitas nirlaba PSAK Nomor 45 diterapkan.

Pada dasarnya organisasi nirlaba dalam hal ini adalah yayasan memiliki tanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang dimiliki, sehingga dengan menjaga esensi atas laporan keuangan maka dapat diartikan pula sebagai salah satu wujud responsibilitas dan akuntabilitas terhadap pihak-pihak terkait (*stakeholders*), antara lain:

1. Bagi *stakeholder*, akuntansi dan laporan keuangan bermanfaat sebagai bentuk alat penyampaian pertanggungjawaban pengurus.
2. Para karyawan profesional organisasi terkait hal imbalan, karier, jabatan, dan masa depan. Maka laporan keuangan diharapkan memberikan informasi berkala, guna memberikan gambaran, tentang pencapaian visi misi organisasi.
3. Para pelanggan atau pihak yang menjadi sasaran akan diuntungkan serta berharap untuk memperoleh manfaat yang dijanjikan organisasi, manfaat atau hasil yang diraih yang apabila mungkin didenominasikan dalam besaran uang.
4. Bagi pemerintah, organisasi nirlaba nonpemerintah harus mematuhi ketentuan undang-undang, serta diharapkan memberi sumbangan positif bagi kehidupan

sosial, politik, ekonomi, dan budaya nasional serta memberi citra baik bagi bangsa. Laporan keuangan berfungsi sebagai umpan balik kepada pemerintah. Apabila ada berbagai harapan dan kepentingan yang berbenturan, maka laporan keuangan secara seimbang memberi informasi bagi berbagai pihak yang berkepentingan itu.

Sebagai kesimpulan, sasaran utama laporan keuangan entitas nirlaba adalah menyajikan informasi kepada penyedia sumber daya, yang ada pada masa berjalan dan pada saat yang akan datang dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengambil keputusan rasional dalam pengalokasian sumber daya kepada entitas nirlaba. Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, atas semua pengambilan keputusan serta penyusunan yang terkait menjadi bagian yang perlu diperhatikan secara seksama terkait dengan laporan keuangan yang dimiliki oleh organisasi nirlaba.

Dengan demikian, untuk mencapai kesesuaian antara laporan keuangan organisasi nirlaba dengan standar yang berlaku yakni PSAK 45, maka dilakukanlah "PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF PSAK NOMOR 45 DI YAYASAN DARUL MUSTAGHITSIN"

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan dalam perspektif PSAK nomor 45 di yayasan Darul Mustaghitsin ?

I.3 Batasan Masalah

Secara spesifik pelaporan keuangan entitas nirlaba diatur dalam PSAK 45, dimana peraturan yang terbaru untuk pelaporan laporan keuangan ini adalah dalam PSAK 45. Perubahan dan perkembangan atas peraturan inilah yang akan menjadi topik pembahasan dengan melakukan analisa penerapan atas standar tersebut, baik dalam pengakuan, pengukuran, pengukuran setelah pengakuan awal, penyajian dan pengungkapan tentunya dalam kaitannya dengan laporan keuangan entitas nirlaba. Sehingga pada akhirnya akan diperoleh suatu tolak ukur atas akuntabilitas dan kepatuhan laporan keuangan entitas nirlaba dalam perspektif PSAK 45. Untuk dapat membuat pembahasan lebih spesifik dan rinci maka pembatasan yang dilakukan adalah terkait dengan jenis dari organisasi nirlaba, dimana organisasi yang diambil yakni adalah Yayasan Darul Mustaghitsin.

I.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kepatuhan atas kerangka dasar akuntansi yang dimiliki dimana terdiri dari pengakuan, pengukuran, pengukuran setelah pengakuan awal transaksi yang terjadi pada Yayasan Darul Mustaghitsin dengan mengacu pada ketentuan PSAK No. 45.
2. Membandingkan sistematika penyusunan bentuk dan isi laporan keuangan Yayasan Darul Mustaghitsin dengan PSAK No. 45, guna untuk mengetahui

penerapan baik secara penuh atau tidak atas PSAK No. 45 terkait dengan penyajian dan pengungkapan atas laporan keuangan.

I.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya analisis yang dilakukan ini, maka manfaat yang diharapkan antara lain:

a. **Manfaat Praktis**

Pengelolaan manajemen keuangan yang baik, dengan melakukan pencatatan keuangan, maka dapat bermanfaat untuk keberlangsungan organisasi nirlaba dengan harapan bisa digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan di masa yang akan datang.

b. **Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan ilmu akuntansi terutama dalam aspek manajemen keuangan dan pencatatan keuangan dalam organisasi nirlaba.

c. **Manfaat Akademis**

Menambah pengetahuan mengenai pelaporan keuangan bagi organisasi nirlaba khususnya pelaporan keuangan yayasan Darul Mustaghitsin dan sebagai tambahan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Sutarti dan Deni Prayitno (2007)	<i>Analisis PSAK No. 45 dalam penyajian laporan Keuangan organisasi Nirlaba. Studi Kasus pada Rumah Sakit "X"</i>	PSAk No. 45 Organisasi Nirlaba.	Penyajian Laporan keuangan rumah sakit dan organisasi nirlaba lainnya diatur dalam pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45. Penyajian Laporan Keuangan pada Rumah Sakit "X" Periode 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003, telah sesuai dengan penerapan PSAK No 45, dimana komponen laporan keuangannya terdiri dari : Laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Hankie Priemaadienova Budirahardjo (2009)	<i>Penerapan Pelaporan Keuangan pada Yayasan Nurul Hayat yang sesuai dengan PSAK No. 45</i>	Laporan Keuangan Yayasan, Psak 45	Pencatatan Yayasan belum melakukan pencatatan jumlah nilai aset bersih sebagai penggolongan dalam nilai ekuitas, selebihnya yayasan telah melakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam PSAK , Pengukuran atau perhitungan, yayasan telah memberikan pengukuran secara tepat dan diperbolehkan oleh aturan didalam PSAK. Tetapi Yayasan tidak melakukan perhitungan yang sesuai dengan PSAK 45 Khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pendapatan

			dan biaya
Ronny Hendrawan (2011)	<i>Analisis penerapan PSAK NO. 45 tentang pelaporan keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum</i>	PSAK NO. 45, Organisasi Nirlaba	Penelitian ini menganalisis tentang penyajian laporan keuangan yang dilakukan RSUD kota Semarang dengan mengacu pada ketentuan mengenai badan layanan umum seperti : peraturan menteri keuangan nomor 76/PMK.05/2008 tentang pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan badan layanan umum
Picella (2012)	<i>Penerapan PSAK No. 45 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Nirlaba (Non Profit) Pada Yayasan</i>	PSAK No.45, Organisasi Nirlaba	Penyajian laporan Keuangan SMK putra khatulistiwa belum menerapkan PSAK No.45 tentang Laporan Keuangan perusahaan nirlaba. Dalam menyusun laporan keuangan, yayasan hanya menyajikan laporan arus kas masuk dan arus kas keluar, dimana pencatatan tersebut tidak sesuai dengan pos-pos pengklasifikasian yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Sunarti (2013)	<i>Penyusunan Lporan Keuangan Pada Yayasan Pendidikan Kasih Baru</i>	Laporan Keuangan Yayasan	Pertanggungjawaban laporan keuangan memerlukan sistem akuntansi yang khusus yaitu yang sesuai dengan PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Yayasan pendidikan kasih baru Internasional belum melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan PSAk No. 45 karena hanya berupa laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Organisasi Nirlaba

Menurut Kurniasari (2011) menyatakan bahwa organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter).

Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah.

Menurut Setiawati (2011) menyatakan bahwa organisasi nirlaba merupakan satu organisasi sosial yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Fokus dari visi dan misi organisasi nirlaba adalah pelayanan kepada masyarakat, seperti yayasan pendidikan, LSM, organisasi keagamaan, panti asuhan, panti wredha dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

2.2.2 Karakteristik Organisasi Nirlaba

Berdasarkan PSAK 45 halaman 2 paragraf 01, dimana suatu organisasi dapat dikelompokkan sebagai organisasi nirlaba bila memenuhi, kriteria sebagai berikut:

1. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

Berdasarkan karakteristik tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai perbedaan antara organisasi nirlaba dengan organisasi laba, sehingga dapat lebih memperjelas tentang batasan pemisahan antara organisasi nirlaba dengan organisasi laba, dimana dalam kepemilikan organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Dalam hal donatur, organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan usahanya. Adapun dana yang diperoleh digunakan antara lain untuk mewujudkan visi dan misi

yang dimiliki oleh organisasi nirlaba tersebut. Dalam hal penyebaran tanggung jawab, pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi Dewan Pengawas, yang kemudian memilih seorang Direktur Pelaksana. Sedangkan pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. Anggota Dewan Komisaris bukanlah 'pemilik' organisasi. Namun, dalam akuntabilitas dan responsibilitas secara spesifik yakni laporan keuangan organisasi baik nirlaba maupun laba pada dasarnya adalah sama. Setiap donatur eksplisit atau tidak, berharap organisasi yang mereka percaya adalah organisasi yang bertanggung jawab.

Tindakan donatur untuk memastikan akuntabilitas organisasi nirlaba penerima dana antara lain:

1. Memantau aktivitas organisasi nirlaba.
2. Kunjungan donatur ke lokasi kegiatan.
3. Meminta organisasi penerima dana untuk membuat laporan keuangan maupun laporan kegiatan.
4. Membandingkan anggaran dengan realisasi anggaran untuk mengevaluasi penggunaan dana.
5. Mewajibkan penerima dana untuk menyerahkan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik.
6. Mengirim auditor untuk mengaudit laporan keuangan penerima dana.

Akuntabilitas yang dapat diberikan oleh organisasi penerima dana, antara lain:

1. Membuat dokumentasi kegiatan, misalnya berupa foto kegiatan, pembuatan daftar hadir dalam pelaksanaan kegiatan, maupun pembuatan video untuk merekam aktivitas.
2. Membuat catatan keuangan yang rapi, yang didukung dengan pengarsipan bukti transaksi keuangan yang rapi.
3. Meyerahkan laporan ke donatur tepat waktu (sesuai dengan yang dijanjikan).

Akuntabilitas dan responsibilitas (tanggung jawab) ini sangatlah penting karena kecenderungan yang menjadi isu utama dalam organisasi nirlaba saat ini secara praktek sudah tidak memenuhi kaidah-kaidah organisasi nirlaba lebih cenderung mengarah kepada organisasi profit. Salah satu yang penyimpangan yang berupa penghindaran atas pajak serta *earnings management* dapat dilakukan melalui organisasi nirlaba.

Terkait dengan objek penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yakni yayasan, maka peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, pasal 52 ayat 1,2,3 yang menyatakan:

Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.”

Ayat 2 menyatakan bahwa “Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang :

- a. Memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau
- b. Mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.

Ayat 3 menyatakan bahwa “Laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diaudit oleh Akuntan Publik.” Sementara berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2004 pasal 5 menyatakan bahwa :

1. Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.
2. Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan :
 - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagai-mana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan.”

Berdasarkan kedua pasal tersebut maka dapat disimpulkan tentang definisi yayasan, berdasarkan kamus Bahasa Indonesia menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah, rumah sakit). Yayasan (Inggris: *foundation*) adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Dimana Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 serta PP RI No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan. Pasal 52 dan pasal 5 merupakan hal yang menyebabkan perbedaan antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, pasal 5 berbunyi “Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.”Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 pasal 52 berbunyi “

1. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.
2. Ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang:

- a. memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau
- b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.
- c. Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- d. Hasil audit terhadap laporan tahunan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.
- e. Bentuk ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

2.2.3 Standar Akuntansi Keuangan

Standar akuntansi keuangan adalah kerangka acuan dalam prosedur yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan sehingga dapat diperoleh kesamaan prosedur dalam menjelaskan bagaimana laporan keuangan disusun dan disajikan, terdapat kesatuan bahasa dalam menganalisa laporan keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan entitas nirlaba pun harus memenuhi dan menerapkan standar akuntansi keuangan yang terkait yakni: SAK UMUM yang berbasiskan IFRS , SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), dan PSAK No. 45.

Menurut Uli Sinaga (2010) pada tahun 2012 ditargetkan terdapat 4 pilar Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, antara lain:

1. SAK UMUM yang terdiri dari PSAK Berbasis IFRS dan PSAK Non IFRS (termasuk syariah).
2. SAK ETAP
3. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
4. Standar Entitas Nirlaba

Dari keempat standar akuntansi yang telah disebutkan di atas, maka sesuai dengan target yang ingin dicapai pada tahun 2012, entitas nirlaba telah memiliki standar akuntansi yang rinci yaitu melalui Standar Entitas Nirlaba.

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca atau laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut dengan kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantulkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur diakui jika:

1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan.
2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Sedangkan menurut SFAC No. 5 Prg 63, terdapat 4 kriteria pengakuan fundamental, yaitu:

1. Definisi (*definition*), suatu pos harus memenuhi definisi elemen keuangan.
2. Keterukuran (*measurability*), suatu pos harus mempunyai atribut yang berpaut dengan keputusan dan dapat diukur dengan tingkat keterandalan yang cukup.

3. Keberpautan (*relevance*), informasi yang dikandung suatu pos mempunyai daya untuk membuat perbedaan dalam keputusan pemakai.
4. Keterandalan (*reliability*), informasi yang dikandung suatu pos secara tepat menyimbolkan fenomena, teruji (terverifikasi) dan netral.

Melalui pengakuan ini, maka suatu transaksi dapat dilihat telah dicatat (dijurnal) atau tidak. Pengakuan secara signifikan terlihat dalam akun-akun laba rugi dan laba komprehensif. Pengukuran (*measurement*) unsur laporan keuangan, berdasarkan SAK ETAP.11 paragraf 2.30:

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengetahui setiap laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan laba rugi. Proses ini menyangkut dasar pemilihan tertentu.

Menurut Suwardjono (2005) pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan, dimana jumlah rupiah ini akan dicatat untuk dijadikan data dasar dalam penyusunan statemen keuangan. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah (kas) yang dicatat pertama kali pada saat suatu transaksi terjadi. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal (*valuation*)

Menurut Suwardjono (2005) pengukuran sering pula disebut sebagai penilaian (*valuation*). Penilaian lebih ditujukan untuk penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu elemen/pos pada saat dilaporkan dalam statemen keuangan. Penilaian berkaitan dengan masalah apakah misalnya sediaan dilaporkan sebesar kas/harga pasar.

Pengukuran umumnya saat perolehan, sementara penilaian jumlah yang dilekatkan pada tiap elemen atau pos statemen keuangan pada saat penyajian. Tujuan penilaian adalah untuk merepresentasikan atribut pos-pos yang berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai.

Atribut adalah sesuatu yang melekat pada suatu objek yang menggambarkan sifat yang dikandung objek tersebut. Atribut pengukuran (*measurement attributes*) suatu elemen/pos adalah dasar pengukuran (jumlah rupiah) yang harus dilekatkan pada suatu elemen/pos untuk merepresentasikan secara tepat atribut yang ingin diungkapkan dari elemen/pos tersebut dalam pelaporan keuangan.

Pengungkapan atau penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan Penyajian terkait dengan cara-cara untuk melaporkan elemen/pos dalam seperangkat statemen keuangan agar elemen/pos tersebut cukup informatif. Pengungkapan adalah cara penyelesaian hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statemen keuangan utama. Dengan adanya penyajian dan pengungkapan maka komunikasi dan tujuan pelaporan keuangan akan tercapai.

2.2.4 Pencatatan Jurnal Standar Pada Organisasi Nirlaba

Beberapa jurnal yang umumnya terdapat di dalam pencatatan transaksi yang dimiliki oleh sekolah atau yayasan pendidikan. Yayasan pendidikan sebagai bagian atas organisasi nirlaba, tentunya akan memiliki pendapatan dan beban seperti

organisasi nirlaba lainnya. Dimana pendapatan dan beban umumnya berasal dari kegiatan operasional terkait dengan kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan sejenis yang menjadi penunjang. Komponen atas pendapatan dan beban yang disajikan dan diungkapkan dapat mengacu kepada contoh laporan keuangan entitas nirlaba berdasarkan PSAK No.45 halaman 15 bentuk A.

Adapun jurnal-jurnal seperti yang telah dinyatakan terkait dengan pendapatan dan beban dengan contoh di organisasi pendidikan, antara lain:

Pendapatan:

1.	Dr. Kas	xxx	
	Dr. Piutang	xxx	
	Cr. Pendapatan- <i>tuition fees</i>		xxx
	Cr. Pendapatan- <i>state appropriations</i>		xxx
2.	Dr. Pengurang pendapatan- <i>scholarship allowances</i>		xxx
	Dr. Beban- <i>educational and general</i>		xxx
	Dr. Kas		xxx
	Cr. Piutang		xxx
	Cr. Pendapatan- <i>auxiliary enterprises sales</i>		xxx

Pendapatan dan *tuition fees* haruslah disajikan secara terperinci (net) atas penyisihan yang tak tertagih serta penyisihan untuk beasiswa (*scholarship allowances*).

2.2.5 Laporan Keuangan Entitas Nirlaba

Berdasarkan PSAK No.45 halaman 4 paragraf 06 menyatakan bahwa tujuan utama atas laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba.

Berdasarkan PSAK No.45 halaman 4 paragraf 07 menyatakan bahwa pihak pengguna laporan keuangan entitas nirlaba memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai:

1. Jasa yang diberikan oleh entitas nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut.
2. Cara manajer melaksanakan tanggungjawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka.

Berdasarkan PSAK No.45 halaman 4 paragraf 08, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan entitas nirlaba, antara lain:

1. Jumlah dan sifat aset, liabilitas, dan aset neto entitas nirlaba;
2. Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aset neto.
3. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya.
4. Cara entitas nirlaba mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman, dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya.

5. Usaha entitas nirlaba .

Pada dasarnya dalam surat al-Baqoroh ayat 282 terdapat prinsip-prinsip pokok etika akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan akuntansi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan **benar**. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, **dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya**. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun

besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Prof. Dr. Hamka menafsirkan ayat 282 surat al-Baqarah dengan adanya beberapa hal yang relevan dengan akuntansi (pencatatan transaksi) sebagai berikut:

”Perhatikan tujuan ayat! Yaitu kepada sekalian yang beriman kepada Allah supaya utang piutang ditulis. Itulah dia yang berbuat sesuatu pekerjaan karena Allah, karena perintah Allah dilaksanakan. Sebab itu tidaklah layak karena baik hati kepada kedua belah pihak lalu berkata tidak perlu dituliskan karena kita sudah percaya mempercayai. Padahal umur kedua belah pihak sama-sama ditangan Allah. Sia Anu mati dalam berhutang, tempat berhutang menagih pada warisnya yang tinggal. Si waris bisa mengingkari utang itu karena tidak ada surat perjanjian”

Beliau mengungkapkan secara jelas betapa wajibnya memelihara tulisan. Perintah ini sering diabaikan umat islam selama ini. Yang lebih parah ada yang menganggap pencatatan yang teliti ini menunjukkan kurang percayaan, padahal ini merupakan perintah Allah. Perintah ini semata demi menjaga kepercayaan yang pada akhirnya berdampak positif terhadap interaksi bermuamalah. Menurut beliau pencatatan transaksi tersebut adalah ditekankan untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah tadi.

Quraisy Shihab menuturkan penafsiran tentang ayat ini dari segi urutan ayat. Ayat ini diletakkan setelah ayat yang menganjurkan sedekah dan berinfak (al-Baqarah 171-174), kemudian disusul dengan ayat larangan transaksi riba (ayat

275-279) juga sikap terhadap pihak yang tidak mampu membayar baik dengan memberi tangguh maupun menyedekahkan sebagian atau bahkan semua hutang tersebut (ayat 280). Peletakan ayat akuntansi, menurut beliau, mengandung arti bahwa pencatatan transaksi (akuntansi) mengharapkan keadilan, sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dengan kekejaman yang diperagakan oleh riba.

Seruan ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ini secara eksplisit mengesankan bahwa transaksi dan pencatatannya hendaknya di tujukan untuk menggapai ridlo-Nya. Artinya, ia patuh dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa ilahi yang melekat dan mengikat manusia untuk tetap berada pada jalur syariah. Prinsip yang terkandung dalam ayat 282 surat al-Baqarah adalah:

a) Adil

Keadilan telah mendapat tempat yang sedemikian penting dalam hampir setiap *maqas'idus syar'iyah*. Pada ayat tentang akuntansi tersebut, kata adil disebut secara tegas sebanyak 2 (dua) kali. Pencarian bentuk akuntansi yang dapat memancarkan nilai keadilan adalah sangat penting karena informasi akuntansi mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi pemikiran, pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan seseorang.

Pengertian dari kata adil adalah lebih bersifat fundamental dan lebih berpijak pada nilai-nilai etika, syariah dan moral memiliki nilai-nilai yang dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai fitrah yang dimiliki manusia. Ini mendorong kita untuk melakukan dekonstruksi terhadap akuntansi modern dengan harapan bahwa

prinsip ini memberikan bentuk akuntansi yang lebih baik.

Penyematan kata adil dalam akuntansi bertujuan untuk mencari bentuk akuntansi yang didalamnya sarat dengan nilai-nilai keadilan. Nilai keadilan ini tidak saja nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis. Akan tetapi ini juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Ini artinya, bahwa manusia, dengan fitrah kemanusiaannya, mempunyai kapasitas internal untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

b) Benar

Prinsip kedua adalah benar. kata adil dalam ayat tersebut juga bisa ditafsirkan menjadi kata benar. Kata benar tentu dipengaruhi tingkat pengetahuan keakuntansian seseorang. Dalam ayat tersebut diungkapkan dengan “*sebagaimana yang diajarkan Allah*”. Dalam akuntansi terdapat proses mengakumulasi, menjumlahkan, menganalisa, mengklasifikasi, dan mencatat yang pada akhirnya melaporkan sebagai informasi. Semakin tinggi tingkat pengetahuan akuntan semakin dekat ia dengan kebenaran dan jauh dari kesalahan. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pekerjaan akuntan sangat kompleks dan meliputi beberapa aktifitas yang berbeda-beda. Secara mendasar akuntan harus:

- 1) Mengidentifikasi data yang berhubungan atau relevan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.
- 2) Memproses atau menganalisis data yang relevan.
- 3) Mentransformasikan data ke dalam informasi yang dapat dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan.

c) Jujur

Prinsip ketiga adalah jujur. Dalam konteks akuntansi kata jujur dalam ayat tersebut secara sederhana berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Bila, misalnya, nilai transaksi adalah Rp. 100 juta, maka akuntansi perusahaan akan mencatatnya dengan jumlah yang sama. Dengan kata lain tidak ada window dressing dalam praktek akuntansi. Pada pengertian ini, praktek moral, yaitu kejujuran adalah yang sangat dominan. Tanpa kejujuran, informasi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat.

d) Tanggung jawab

Ketiga prinsip tersebut, yakni adil, benar dan jujur, kemudian dikemas dengan prinsip tanggung jawab baik kepada sesama dan utamanya kepada Allah. Dalam pertengahan ayat akuntansi (ayat 282 surat al-Baqarah) disebutkan *ميراللهاق تيلو* dan hendaklah dia (akuntan) takut kepada Allah, tuhanannya. Sikap tanggung jawab ini penting karena:

- 1) Kesiediaan untuk melakukan apa yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ia merasa terikat untuk menyelesaikannya demi tugas itu sendiri.
- 2) Sikap bertanggung jawab lebih tinggi dari pada tuntunan etika atau peraturan. Etika atau peraturan hanya mempertanyakan apakah sesuatu boleh atau tidak, sedangkan sikap tanggung jawab lebih terkait dengan nilai yang diemban atau akan dihasilkan. Namun demikian tidaklah berkenan akuntan yang mengatas namakan tanggung jawab (hasil) lantas ia meninggalkan etika.
- 3) Wawasan orang yang bersedia untuk bertanggung jawab secara prinsip tidak

terbatas. Ia tidak memiliki perhatiannya pada apa yang menjadi urusan dan kewajibannya, melainkan merasa bertanggung jawab di mana saja diperlukan.

- 4) Kesiediaan untuk bertanggung jawab dalam segala bidang termasuk kesiediaan untuk diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Bagaimanapun juga dalam bermuamalah latihan beretika adalah hal yang paling utama, disamping menguasai materi dari akuntansi. betapapun baiknya sistem dan konsep namun bila tidak dibarengi dengan etika pelakunya, maka sistem tersebut tidak membuahkan kebaikan.

Komponen atas laporan keuangan nirlaba dengan mengacu kepada penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas nirlaba berdasarkan pada PSAK No.45, terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan (*Statement of Financial Condition*)
 - a) Klasifikasi Aset dan Kewajiban

Informasi likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut :

Menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan kewajiban berdasarkan tanggal jatuh tempo, mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar, dan kewajiban ke dalam jangka pendek dan jangka panjang, dan mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh temponya kewajiban termasuk pembatasan penggunaan aset, pada catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan pada PSAK No.45 halaman 3 paragraf 05, yaitu:

Aset Bersih Terikat Permanen, adanya pembatasan sumber daya secara permanent dari penyumbang dalam pemanfaatan atau penggunaan oleh organisasi, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Aset Bersih Terikat Temporer, pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Aset Bersih Tidak Terikat, sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanent atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.

Akun-akun yang umumnya terdapat di dalam laporan posisi keuangan, antara lain:

1. Kas dan setara kas, dalam kondisi dimana sumbangan dana yang bersifat terikat harus dipisahkan dari kas tidak terikat.
2. Piutang hibah, yang disajikan *net realizable value*, merupakan sumbangan dana yang akan diberikan oleh pemberi sumbangan, namun secara actual belum terealisasi.
3. Beban dibayar di muka, merupakan pembayaran yang dilakukan dimuka untuk memperoleh manfaat di masa depan.
4. Investasi, dalam hal ini investasi yang dilakukan dalam bentuk saham maupun obligasi yang disajikan berdasarkan *fair market value*.

5. Aset tetap, yang terdiri dari *property, plan, and equipment* yang disajikan secara *net book value* setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Pada dasarnya pola perhitungan atas aset tetap baik perolehan maupun pencatatannya adalah sama dengan entitas laba.
6. Koleksi, seperti benda-benda seni, benda-benda bersejarah yang dapat dikapitalisasi maupun dibebankan dan disusutkan.
7. Hutang, jumlah/nominal yang harus diselesaikan dengan pihak-pihak terkait.
8. Hutang hibah, merupakan sumbangan dana yang diberikan untuk kemudian lebih lanjut didistribusikan ke lembaga-lembaga nirlaba lainnya dengan mengacu kepada instruksi pemberi sumbangan.
9. *Refundable advances*, merupakan pendapatan yang ditangguhkan atas penerimaan dana dari donor yang bersifat terikat permanen. Dimana atas saldo sisa yang dimiliki harus dikembalikan (*refundable*).
10. *Due to third parties*, merupakan distribusi maupun transfer antar lembaga/organisasi nirlaba yang dilakukan atas persetujuan dan penunjukan organisasi penerima berdasarkan keputusan pemberi sumbangan.
11. Hutang jangka panjang, merupakan hutang yang memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun.

2. Laporan Aktivitas (*Statement of Activity*)

Laporan aktivitas difokuskan pada organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset bersih selama suatu periode. Perubahan aset bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aset bersih dalam laporan posisi keuangan.

a. Perubahan kelompok aset bersih

Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aset bersih terikat permanen, aset bersih terikat temporer, dan aset bersih tidak terikat dalam suatu periode.

b. Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan dan Kerugian

Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambahan aset bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aset bersih tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambahan aset bersih tidak terikat, terikat permanent, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lainnya (atau kewajiban) sebagai penambahan aset bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

c. Informasi Pendapatan dan Beban

Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Namun demikian pendapatan investasi, dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

d. Informasi pemberian jasa

Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung.

Aset bersih mengalami peningkatan saat pendapatan dicatat dan mengalami penurunan saat beban dicatat. Perubahan aset bersih akan menghasilkan kondisi surplus atau defisit, dimana akan menjadi tolak ukur atas penilaian keefektifan serta keefisienan entitas nirlaba dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya.

Akun-akun yang umumnya terdapat di dalam laporan aktivitas, antara lain:

- (a) Kontribusi, dilakukan pencatatan sesuai dengan *fair market value* pada saat tanggal pemberian. Pada saat terdapat aliran arus kas di masa depan maka dapat disajikan dengan menggunakan *discounted present value* sehingga pendapatan dapat dicatat.
- (b) Pendapatan atas program jasa, merupakan pendapatan yang diperoleh atas pemenuhan jasa kepada pihak terkait atau pendapatan yang diperoleh sebagai akibat atas pertukaran maupun transfer atas kas maupun aset lainnya.
- (c) *Membership dues*, merupakan pendapatan yang diperoleh secara rutin atas pembayaran oleh anggota.
- (d) *Special event revenue*, pengumpulan dana secara khusus atas suatu kegiatan, dimana disajikan secara terpisah dari akun kontribusi.
- (e) Pendapatan investasi, yang berasal dari saham (dividen) maupun obligasi (bunga/*interest*).

- (f) *Program expenses*, merupakan beban yang timbul dalam rangka realisasi/pemenuhan misi organisasi.
- (g) *Fundraising expenses*, merupakan pengumpulan atas beban. Beban yang dikeluarkan adalah beban yang terkait dengan kegiatan untuk menghasilkan pendapatan/penghasilan.
- (h) Beban administrasi, merupakan beban yang timbul atas kegiatan administrasi yang dilakukan oleh organisasi.

3. Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.

Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK no. 2 tentang Laporan Arus Kas dengan tambahan berikut :

1. Aktivitas Pendanaan: Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang. Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment), dan bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.
2. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi

Definisi atas komponen laporan arus kas berdasarkan SAK ETAP halaman 167, antara lain:

1. Aktivitas operasi: Aktivitas penghasil pendapatan utama dari entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi atau pendanaan.
2. Aktivitas investasi: Perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
3. Aktivitas pendanaan: Aktivitas yang menimbulkan perubahan dalam ukuran dan komposisi setoran ekuitas dan pinjaman entitas.
4. Catatan Atas Laporan Keuangan
Merupakan penjelasan singkat mengenai kebijakan akuntansi yang penting serta berisikan tentang kebijakan atas sumbangan.

Berdasarkan pada SAK ETAP halaman 34 paragraf 8.2, menyatakan bahwa Catatan atas laporan keuangan harus:

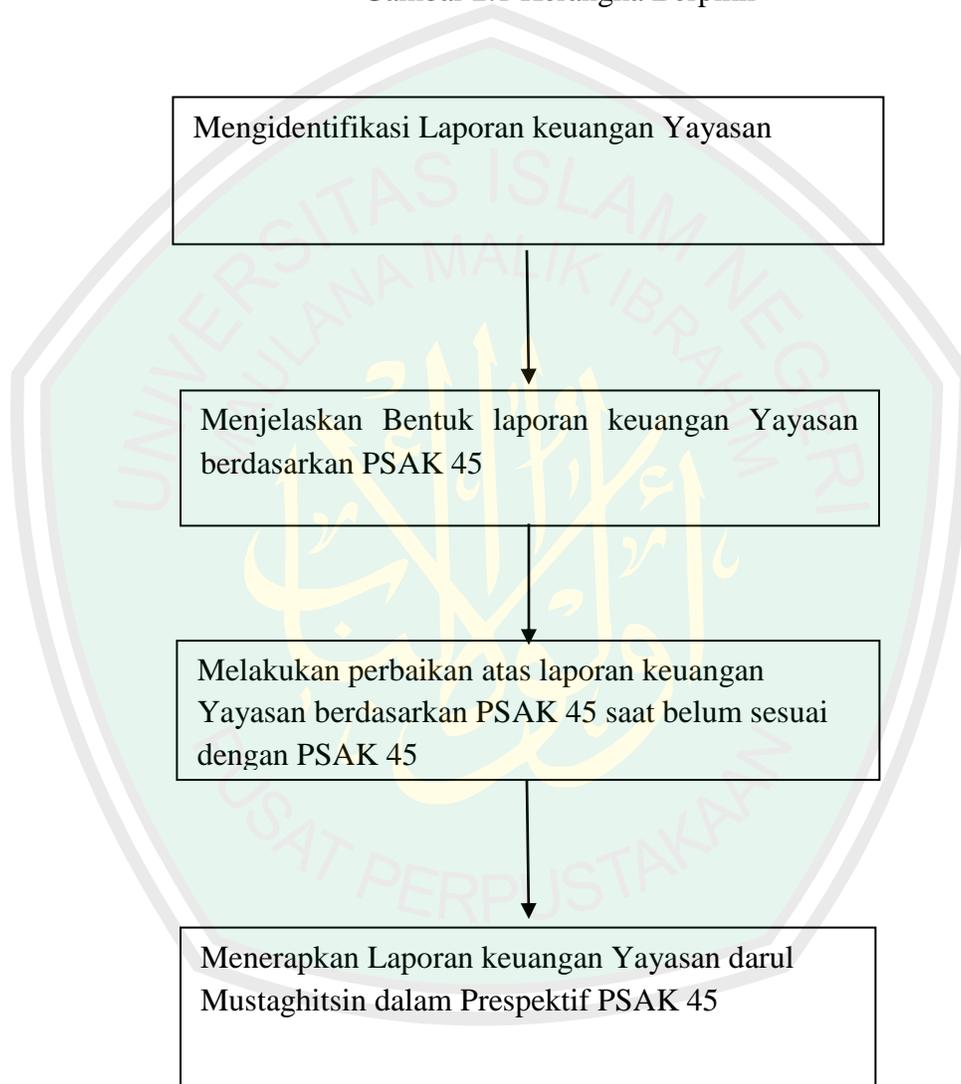
- (a) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraf 8.5 dan 8.6;
- (b) memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Laporan keuangan yang telah disebutkan di atas akan memberikan manfaat yang maksimal sekaligus menjadi sarana yang optimal dalam pengambilan keputusan bagi para pihak terkait, bilamana disajikan sesuai dengan standar yang berlaku.

2.3 Kerangka Berpikir

Pembahasan penelitian ini didasarkan pada langkah-langkah pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian

Di yayasan Darul Mustaghitsin jl Veteran Nomor 48B Banjarmasin,
Lamongan

3.2 Data dan Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer : merupakan data dan informasi yang dikumpulkan dari yayasan masih dalam bentuk baku dan masih memerlukan pengolahan lebih lanjut, jenis data primer ini antara lain yaitu data yang diperoleh dari pengurus yayasan Darul Mustaghitsin, keterangan yang berupa laporan kemudian disusun kembali.
- b. Data Skunder : yaitu data penulis peroleh dalam bentuk yang telah jadi tanpa mengalami perubahan, jenis data skunder ini antara lain yaitu laporan keuangan, sejarah umum dan struktur organisasi.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2011:224) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, Sugiyono (2011:225) menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data yang lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Selanjutnya teknik

pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi. Berdasarkan teori tersebut, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2011:226) melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi partisipatif pasif. Yang dimaksud dengan observasi partisipatif pasif adalah peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Dalam Penelitian ini Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan:

- a. Mengamati Kondisi Internal Yayasan
- b. Mengamati proses penyusunan serta pelaporan Laporan Keuangan
- c. Meneliti Informasi yang ada dalam Laporan Keuangan
- d. Mengamati masalah yang ada dalam Yayasan Darul Mustaghitsin

2. Wawancara

Jenis wawancara yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur, yang menurut Sugiyono (2011:233) pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Selain itu, tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan mencari informasi secara langsung dari responden. Contoh wawancara yang dilakukan seperti:

- a) Bagaimana Proses Penyusunan hingga pelaporan laporan keuangan Yayasan Darul Mustaghitsin
- b) Dalam Penyusunan hingga Pelaporan kendala apa yang dihadapi
- c) Apa seluruh informasi yang ada dalam Yayasan dilampirkan pada Pelaporan Laporan Keuangan.

3. Studi Dokumen

Menurut Sugiyono (2011:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Hasil penelitian akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan untuk mendukung dua metode sebelumnya adalah berupa:

- a. dokumen berita acara penyusunan, pengesahan anggaran dan Laporan Keuangan.
- b. Dokumen tentang Informasi internal Yayasan
- c. Laporan Kinerja Yayasan

Menurut Wirawan (2011:210) studi dokumen dilakukan melalui proses: (1) meneliti keaslian dokumen seperti Laporan Keuangan; (2) memilih Laporan Keuangan yang diperlukan untuk evaluasi; dan (3) meneliti isinya.

Berdasarkan dari data yang diperoleh penulis dari Yayasan Darul Mustaghitsin, kemudian data itu dikelompokkan sesuai dengan sub pembahasan dan seterusnya data yang telah dikelompokkan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode

deskriptif. Analisis ini membandingkan antara data yang diperoleh dari yayasan dengan berbagai teori yang mendukung pembahasan.

3.4 Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik-karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti. Penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase yang spesifik atau khas dari keseluruhan personalita. Studi eksploratif yang bersifat teoritis juga dilaksanakan berdasarkan suatu pertimbangan untuk mendapatkan perbandingan yang lebih baik pada masalah yang bersangkutan (penyusunan laporan keuangan Yayasan Darul Mustaghitsin), karena terbatasnya studi atau penelitian (termasuk literatur-literatur) yang membahas mengenai pelaporan keuangan Yayasan Darul Mustaghitsin. Penelitian deskriptif ini menunjukkan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian yang mengevaluasi laporan keuangan tahunan Yayasan Darul Mustaghitsin di daerah Lamongan diawali dengan analisis komparatif terhadap objek penelitian dengan konsep pembandingan dalam hal kebijakan akuntansi maupun penyajian laporan keuangan, kemudian mencoba menyesuaikan dan mengkombinasikan empat unsur, yaitu:

Langkah-Langkah yang perlu dilakukan dalam prosedur analisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi laporan keuangan Yayasan
2. Menjelaskan bentuk kerangka laporan keuangan Yayasan berdasarkan PSAK 45
3. Melakukan perbaikan atas laporan keuangan Yayasan berdasarkan PSAK 45 saat belum sesuai dengan PSAK 45
4. Menyusun Laporan Keuangan Yayasan berdasarkan PSAK 45



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Latar Belakang Yayasan

Yayasan Darul Mustaghitsin yang terletak di wilayah Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur merupakan Yayasan yang dibentuk dan dinotariskan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011, mempunyai visi dan misi serta bertujuan di bidang Sosial, kemanusiaan dan keagamaan.

Berawal dari pemikiran tersebut pengurus yang tergabung dalam kepengurusan Yayasan Pesantren Darul Mustaghitsin yang berlatar belakang dan berasal dari berbagai profesi (Ustadz, Pengusaha, Pegawai Negeri, Pegawai Swasta, Notaris, Guru, dan lainnya) berharap dapat mewujudkan suatu wadah pendidikan yang berkonsepkan Islam dan sekaligus dapat menyantuni anak-anak Yatim / Piatu dan tidak mampu (Dhuafa), yang sekaligus dapat dijadikan tempat pembinaan generasi muda yang Islami dan madani yang mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang tinggi berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa serta masa depannya sendiri. Lokasi Yayasan terletak di Jl Veteran nomor 48B. Lamongan.

Berdirinya Yayasan Pesantren Darul Mustaghitsin dilatar belakangi keprihatinan para pendiri tentang kondisi anak – anak muslim, khususnya di wilayah Desa banjarmendalan dan sekitarnya yang sangat ironis; di satu sisi kehidupan mereka sudah terpengaruh dengan budaya konsumtif namun di sisi lain perhatian mereka terhadap pendidikan masih minim khususnya pendidikan Islam. Kegiatan,

program kerja dan aktivitas Yayasan dilakukan seirama dengan tuntutan stake holder sehingga dapat memberi manfaat, motivasi dan prestasi anak-anak yang dikelola oleh yayasan Pesantren Darul Mustaghitsin.

4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Yayasan

Visi merupakan bernuansa Islami, unggul dalam prestasi, menjunjung tinggi tradisi, santun dalam bersikap, diminati masyarakat dan meraih kemuliaan hidup dalam kebahagiaan masa depan.

Misi merupakan membina peserta didik berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Misi dari yayasan Darul Mustaghitsin adalah Mewujudkan tercapainya peningkatan mutu pendidikan, mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan Iptek dan Kebudayaan, membina akhlak dan budi pekerti, meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat, menyebar semangat demokrasi secara inovatif, mengantarkan peserta didik menggapai prestasi dan membangkitkan daya juang bagi kemuliaan hidup dan kebahagiaan masa depan.

Tujuan Yayasan Pesantren Darul Mustaghitsin mempunyai Maksud dan Tujuan sebagai berikut:

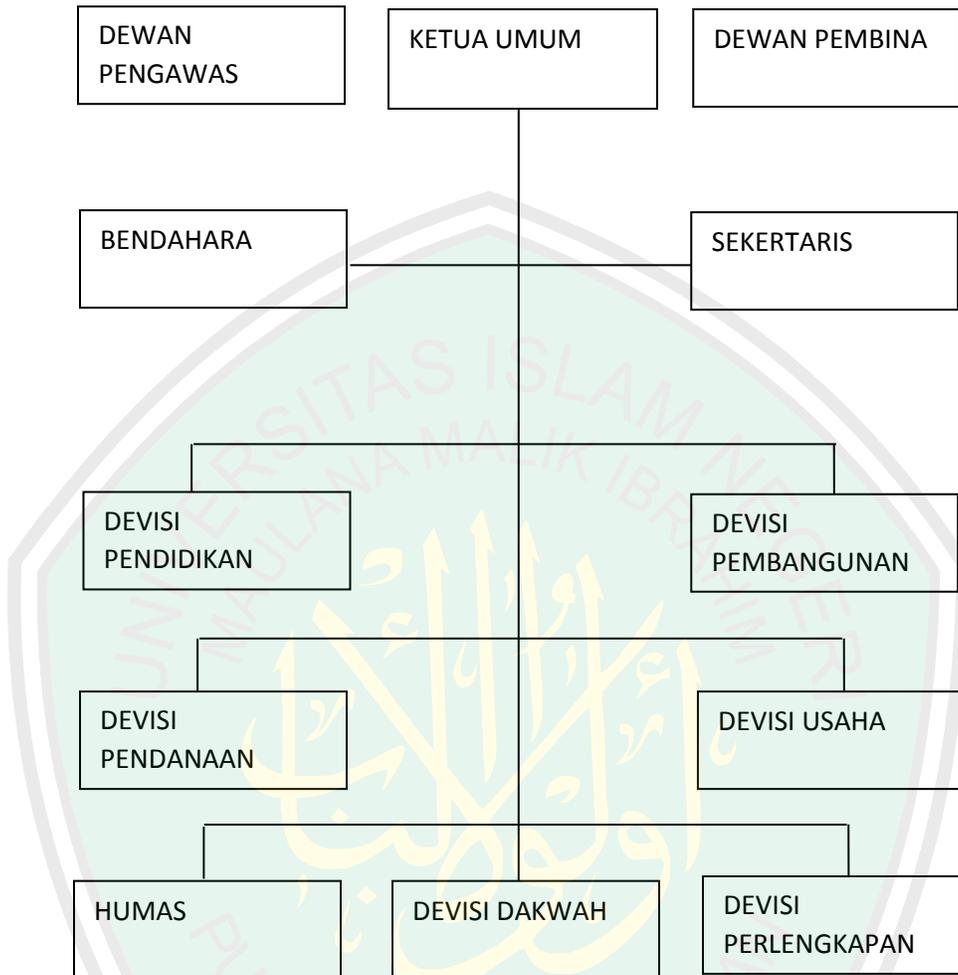
1. Meningkatkan SDM dan fasilitas pendidikan demi tercapainya upaya peningkatan kualitas pendidikan.
2. Mengembangkan dakwah Islamiyah di masyarakat demi terciptanya muslim taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan mumpuni, cakap dan terampil serta bertanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara.

3. Merevitalisasi kebudayaan Islam di wilayah Yayasan demi membendung kebudayaan asing yang bertentangan dengan syari'at Islam atau kepribadian bangsa Indonesia.
4. Membantu memberikan keringanan biaya pendidikan kepada santri yang tidak mampu.

4.1.3. Struktur Organisasi Yayasan

Agar tercapainya tujuan yayasan, diperlukan organisasi yang mengelola kegiatan yayasan tersebut. Semakin besar yayasan maka semakin besar pula persoalan organisasinya, maka diperlukan pembagian tugas yang sesuai dengan bakat keahliannya. Organisasi yayasan merupakan bagian yang sangat penting dalam yayasan agar menjamin kelangsungan hidupnya. Dengan adanya organisasi semua bagian yang ada dalam yayasan menjadi berfungsi dengan bidangnya masing-masing. Agar dapat berjalan searah diperlukan adanya kemampuan dari pimpinan untuk mengelola yaitu kontinuitas yayasan. Keberadaan struktur organisasi akan dapat menghindari adanya tugas rangkap, karena masing-masing bagian sudah mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Struktur Organisasi Yayasan Pesantren Darul Mustaghitsin



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Susunan Pengurus Yayasan Darul Mustaghitsin

Periode 2014-2015

Tabel 4.1 Susunan Pengurus Yayasan

NO	NAMA	JABATAN
1	KH. Mas'ud Al Mdjenar	Pembina
2	H. Abdul Hamid	Pembina
3	H. Achmad Fata'al Chuzaibi	Pembina
4	Ahmad Makki Ulinuha	Pembina
5	Hj. Afifah	Pembina
6	Dr H. Imam Trisno Edy, MM	Ketua
7	Drs H. Soemarsono, MM	Wakil Ketua
8	H. Achmad Anwar, SH	Wakil Ketua
9	Ifadatul Manunah, SE	Wakil Ketua
10	Abdul Ghoni, SE	Sekrtaris
11	Achmad Chanafi	Wakil Sekretaris
12	Fikriyatun Nafizah, ST	Wakil Sekretaris
13	Misbachul Ulum	Walik Sekretaris
14	H. Mohammad Hidayat Anwar, SH	Bendahara
15	H. Mastur	Wakil Bendahara
16	Imam Baidhowi	Wakil Bendahara

4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan Yayasan

4.1.4.1 Bidang Sosial

Lembaga Pendidikan formal dan nonformal yaitu Madrasah Tsanawiyah (MTS), mendirikan kursus-kursus keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sanggar belajar serta kursus bahasa asing tak terbatas pada bahasa inggris dan bahasa arab termasuk juga didalamnya

kursus privat, pendidikan ekonomi dan koperasi pendidikan melalui media massa, cetak dan elektronik.

- 1) Permasalahan Sosial yaitu diantaranya Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda serta permasalahan sosial lainnya.
- 2) Pembinaan Olahraga.
- 3) Pembinaan Kesenian.
- 4) Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan.
- 5) Dan Study Banding.

4.1.4.2 Bidang Kemanusiaan

- 1) Memberi bantuan kepada korban bencana alam.
- 2) Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.
- 3) Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan.
- 4) Memberikan perlindungan konsumen.
- 5) Melestarikan lingkungan hidup di antaranya melestarikan di bidang kesenian dan kebudayaan.

4.1.4.3 Bidang Keagamaan

- 1) Mendirikan sarana ibadah.
- 2) Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah, yaitu diantaranya menyelenggarakan pesantren Darul Mustaghitsin, Madrasah Diniyah.
- 3) Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah.

- 4) Meningkatkan pemahaman keagamaan, yaitu diantaranya melalui majlis ta'lim pesulukan thoriqoh.
- 5) Study banding keagamaan.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan tiga cara. Pertama adalah wawancara, wawancara dilakukan secara langsung dengan pengasuh dan bagian bendahara Yayasan Pesantren Darul Mustaghitsin. Kedua adalah observasi, observasi dilakukan dengan cara pengamatan pada prosedur pencatatan transaksi hingga menjadi laporan keuangan. Ketiga adalah dokumentasi, dokumentasi diperoleh dengan mendapatkan data sekunder berupa bukti transaksi, daftar kegiatan dan hal-hal yang berkaitan dengan yayasan.

Menurut PSAK Nomor 45 Laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan memperhatikan sifat pembatasan dana, menurut PSAK Nomor 45 mendefinisikan sebagai berikut:

- Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.
- Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh

penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.

- Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.

- Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Menurut PSAK Nomor 45 menjelaskan bahwa komponen laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi :

- a. Laporan Posisi Keuangan
- b. Laporan Aktifitas
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan

4.2.1. Laporan Posisi Keuangan

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan, dan informasi dalam laporan keuangan lain dapat membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain untuk menilai kemampuan entitas nirlaba

dalam memberikan jasa secara berkelanjutan serta likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Komponen-komponen yang ada di laporan posisi keuangan adalah:

4.2.1.1 Aset

1. Aset Lancar

a. Kas dan setara kas

Format pencatatan kas dan setara kas yang ada di yayasan telah benar karena telah masuk di laporan posisi keuangan, sebagaimana data yang didapat peneliti pada *lampiran 1*.

Kas dan setara kas yang ada di yayasan telah di sajikan sesuai penerimaan dan pengeluaran yang ada. Meski realita yang ada nominal kas dan setara kas cukup kecil, karena sebagian besar penerimaan dan pengeluaran hanya ketika ada kebutuhan, dalam hal ini sebagian besar penerimaan kas dan setara kas berasal dari pengasuh pondok dimana langsung menambah aset tidak terikat yayasan dalam bentuk sumbangan, jadi ketika ada pengeluaran kas dan setara kas maka saat itu juga akan ada penerimaan kas dan setara kas. Sebagaimana kutipan wawancara peneliti;

“sebagian besar kas disini itu ya dari saya mas, misal kalau ada biaya listrik maka saya yang mbayarin, tapi juga ada kok sumbangan dari orang lain tapi nilainya gak banyak. Untuk kas ada sih tapi gak banyak mas cuma buat keperluan yang sifatnya mendadak, saat ini kas kita ada Rp. 7.000.000,-”.

Maka dalam hal ini kas dan setara kas yayasan Darul Mustaghitsin adalah sebesar Rp. 7.000.000,-

b. Piutang

Piutang yang ada di yayasan telah disajikan sebagaimana mestinya, karena aktivitas yang mereka lakukan tidak ada yang menggunakan sistem kredit maka piutangnya pun tidak ada. Sebagaimana kutipan wawancara peneliti;

“gak ada mas, baik piutang maupun hutang kita gak ada, kalau ada yang mau nyumbang ya kita terima kalau gak ada ya udah, kita gak mengharapkin kok kalau rejeki gak bakal kemana kok”.

Maka dalam hal ini piutang yayasan Darul Mustaghitsin adalah sebesar Rp. 0,-

c. Perlengkapan

Perlengkapan yang dimiliki yayasan telah disajikan namun pada pos yang salah. Sebagaimana data yang diperoleh peneliti pada lampiran 2.

Dalam hal ini saat perolehan aset maka aset tersebut disajikan pada laporan laba/rugi padahal perlengkapan seharusnya masuk di laporan posisi keuangan. Sebagaimana kutipan wawancara peneliti;

“saat ada pembelian perlengkapan ya saya masukin ke laba/rugi mas, saya kira itu ya pengeluaran yayasan maka saya masukin aja di laporan laba/rugi. Kalau untuk nilainya kira-kira ada Rp. 1.000.000,- itu berbagai macam perlengkapan mas”.

Maka dalam hal ini perlengkapan yayasan Darul Mustaghitsin adalah sebesar Rp. 1.000.000,-

2. Aset Tetap

a. Peralatan

Peralatan yang dimiliki yayasan telah disajikan namun pada pos yang salah.

Sebagaimana data yang diperoleh peneliti pada *lampiran 2*.

Dalam hal ini saat perolehan aset maka aset tersebut disajikan pada laporan

laba/rugi padahal peralatan seharusnya masuk di laporan posisi keuangan.

Sebagaimana kutipan wawancara peneliti;

“saat ada pembelian peralatan ya saya masukan ke laba/rugi mas sama kayak perlengkapan, saya kira itu ya pengeluaran yayasan maka saya masukan aja di laporan laba/rugi”.

Peralatan yang dimiliki oleh yayasan terdiri dari berbagai macam barang dan

sumber yang berbeda, ada yang dari sumbangan tidak terikat ada pula yang

membeli sendiri. Sebagaimana kutipan wawancara peneliti;

“untuk peralatannya kita punya LCD-proyektor 1 set kita beli Rp. 5.000.000,- Komputer Rp. 5.500.000,- Laptop Rp. 3.200.000,- Notebook Rp. 3.000.000,- Sound Rp. 1.100.000,- Kamera Rp. 1.100.000,- CCTV Rp. 4.300.000,- Lemari Rp.1.500.000,- untuk penyusutannya masih belum kita hitung mas”.

Dari kutipan wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa peralatan

yayasan adalah senilai Rp. 23.450.000,- dengan rincian LCD-proyektor Rp.

5.250.000,- Komputer Rp. 5.500.000,- Laptop Rp. 3.200.000,- Notebook Rp.

3.000.000,- Sound Rp. 1.100.000,- Kamera Rp. 1.100.000,- CCTV Rp.

4.300.000,- Lemari Rp.1.500.000,-

Tahun perolehan peralatan yang ada di yayasan adalah tahun 2014, maka

penyusutannya adalah 1 tahun. Sebagaimana kutipan wawancara peneliti;

“kita dapatnya tahun kemaren mas, jadi kira-kira 1 tahun lah. Nanti umur ekonomisnya sampeyan estimasi sendiri aja”.

b. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh yayasan telah disajikan, namun belum sesuai dengan standart yang berlaku. Dalam hal ini dikarenakan penyajiannya di gabung dengan bangunan, padahal dalam standart yang berlaku tanah dan bangunan harus di pisah. sebagaimana pada *lampiran 1*.

Sedangkan untuk harga perolehan tanah adalah Rp. 300.000.000,-
Sebagaimana kutipan wawancara peneliti;

“tanah dan bangunannya saya jadikan satu mas, kalau semua kisaran Rp.900.000.0000,- rinciannya tanahnya Rp. 300.000.000,- jadi bangunannya kira-kira Rp. 600.000.000,- “.

Maka tanah yang dimiliki yayasan adalah senilai Rp. 300.000.000,-

c. Bangunan

Bangunan yang dimiliki oleh yayasan telah disajikan, namun belum sesuai dengan standart yang berlaku. Dalam hal ini dikarenakan penyajiannya di gabung dengan tanah, padahal dalam standart yang berlaku tanah dan bangunan harus di pisah. sebagaimana pada *lampiran 1*.

Sedangkan untuk harga perolehan bangunan yang mana sampai saat ini masih dalam pembangunan adalah Rp. 600.000.000,- Sebagaimana kutipan wawancara peneliti;

“tanah dan bangunannya saya jadikan satu mas, kalau semua kisaran Rp.900.000.0000,- rinciannya kira-kira tanahnya Rp. 300.000.000,- Bangunannya kira-kira Rp. 600.000.000,- “.

Maka Bangunan yang dimiliki yayasan adalah senilai Rp. 600.000.000,-

Pembangunan bangunan yang ada di yayasan dimulai pada tahun 2011, maka penyusutannya adalah 4 tahun. Sebagaimana kutipan wawancara peneliti;

“kita bangunnya mulai tahun 2011 kemaren mas. Nanti umur ekonomisnya sampeyan estimasi sendiri aja”.

4.2.1.2 Liabilitas

1. Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek yang ada di yayasan telah disajikan secara tepat.

Karena di yayasan sangat jarang ada transaksi secara kredit, semua pengeluaran diusahakan secara tunai jadi untuk hutang sangat kecil.

Sebagaimana kutipan wawancara peneliti;

“gak ada mas, baik piutang maupun hutang kita gak ada, kalau ada yang mau nyumbang ya kita terima kalau gak ada ya udah, kita gak mengharapkan kok kalau rejeki gak bakal kemana kok”.

Maka dalam hal ini hutang yayasan Darul Mustaghitsin adalah sebesar Rp. 0,-

2. Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang yayasan telah disajikan sesuai standart yang berlaku.

Dalam hal ini meski yayasan tidak memiliki liabilitas jangka panjang karena tidak terikat dengan pihak lain dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun namun yayasan telah melaporkan liabilitas jangka panjangnya, yakni sebesar Rp. 0,-

sebagaimana kutipan wawancara peneliti;

“untuk yang jangka pendek aja kita usahakan tidak ada mas apalagi yang jangka panjang, kita sementara jalan semampunya saja”.

Maka liabilitas jangka panjang yayasan adalah Rp. 0,-

4.2.1.3 Aset Neto

1. Tidak Terikat

Aset neto tidak terikat yang ada di yayasan telah tercatat namun pada laporan aktivitas. Meski dalam laporan posisi keuangan terdapat pos ekuitas namun nilai yang tercatat hanyalah total dari apa yang di miliki oleh yayasan, belum berdasarkan pada ada atau tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali.

Pemasukan yang ada di yayasan semua berasal dari sumbangan, baik itu sumbangan pengasuh atau yang lain. Sebagaimana kutipan wawancara peneliti;

“semua pemasukan ya dari sumbangan-sumbangan mas, 90% ya dari saya tapi ada yang dari orang lain yang ikut nyumbang ke yayasan meski gak banyak. Tapi mereka gak minta atau ngasih batasan kok mas, intinya murni sumbangan dan kita dipersilahkan untuk memanfaatkannya”.

Maka total aset neto tidak terikat yayasan adalah sebesar Rp. 929.450.000,- dengan rincian kas dan setara kas Rp. 5.000.000,- perlengkapan Rp. 1.000.000,- peralatan Rp. 23.450.000,- tanah Rp. 300.000.000,- dan bangunan Rp. 600.000.000,-

2. Terikat Temporer

Aset neto terikat temporer yayasan belum disajikan sesuai dengan standart. Dalam hal ini meski aset neto terikat temporer yayasan Rp. 0 namun tetap harus disajikan di laporan posisi keuangan. Sebagaimana kutipan peneliti;

“untuk sumbangan semua tidak terikat mas, yang terikat tidak ada jadi ya tidak saya laporkan”.

Maka aset neto terikat temporer yayasan adalah Rp. 0,-

3. Terikat Permanen

Aset neto terikat permanen yayasan belum disajikan sesuai dengan standart. Dalam hal ini meski aset neto terikat permanen yayasan Rp. 0 namun tetap harus disajikan di laporan posisi keuangan. Sebagaimana kutipan peneliti;

“untuk sumbangan semua tidak terikat mas, yang terikat tidak ada jadi ya tidak saya laporkan”.

Maka aset neto terikat permanen yayasan adalah Rp. 0,-

Dari uraian di atas peneliti menarik ringkasan untuk saldo laporan posisi keuangan per 31 Maret 2015 yayasan pesantren Darul Mustaghitsin Kec. lamongan Kab. Lamongan sebagai berikut;

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
YAYASAN PESANTREN DARUL MUSTAGHITSIN
Per 31 Maret 2015**

Aset

Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas	7,000,000
Piutang	0
Perlengkapan	1,000,000
Total Aset Lancar	8,000,000
 Aset Tidak Lancar	
Tanah	300,000,000
Bangunan	600,000,000
Ak. Peny. Bangunan	(90,000,000)
Peralatan	23,450,000
Ak. Peny. Peralatan	(5,862,500)
Total Aset Tidak Lancar	827,587,500

Total Aset	835,587,500
Liabilitas	
Liabilitas Jangka Pendek	0
Total Liabilitas Jangka Pendek	0
Liabilitas Jangka Panjang	0
Total Liabilitas Jangka Panjang	0
Total Liabilitas	0
Aset Neto	
Tidak Terikat	835,587,500
Terikat Temporer	0
Terikat Permanen	0
Total Aset Neto	835,587,500
Total Liabilitas dan Aset Neto	835,587,500

4.2.2. Laporan Aktivitas

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto; hubungan antar transaksi dan peristiwa lain; dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur dan pihak lain untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode; menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas nirlaba dalam memberikan jasa dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Komponen-komponen yang ada di laporan aktivitas adalah:

1. Perubahan Aset Neto Tidak Terikat

Komponen ini menyajikan pendapatan dan beban yang berkaitan dengan aset neto tidak terikat. Misalnya sumbangan, jasa layanan, kegiatan A, kegiatan B, manajemen-umum dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya yayasan pesantren Darul Mustaghitsin menyajikan laporan aktivitas menjadi satu tanpa memisah apakah aktivitas tersebut berkaitan dengan aset neto terikat atau tidak terikat. Maka hal ini lah yang membutuhkan pembetulan.

Di sisi lain semua sumber daya yayasan di dapat dari sumbangan tidak terikat, namun yayasan membuat laporan aktivitas tersebut dengan memisah berdasarkan pemberi sumber daya (dari pengasuh/selain pengasuh) meski semuanya adalah sumbangan tidak terikat. maka semua aktivitas yang ada di yayasan akan masuk ke perubahan aset neto tidak terikat. Sebagian besar kegiatan yang ada di Yayasan menggunakan sumber daya dari pengasuh, namun ada sedikit yang dari selain pengasuh. Maka peneliti mencoba untuk menyusun laporan kegiatan yang ada di yayasan Darul Mustaghitsin, yakni sebagai berikut;

1) Madrasah Diniyah

LAPORAN KEGIATAN
MADRASAH DINIYAH
YAYASAN PESANTREN DARUL MUSTAGHITSIN
Periode 201X

Uraian	Jumlah
Pemasukan	
Syahriyah Santri	15.000.000
Sumbangan	12.000.000
Total Pemasukan	17.000.000
Pengeluaran	
Honor Ustadz	4.800.000
Alat Tulis Kantor (ATK)	800.000
Beban Listrik dan Air	-
Beban Penyusutan Peralatan	5.862.500
Total Pengeluaran	

2) PHBI Hari Raya Idul Adha

LAPORAN KEGIATAN

PHBI HARI RAYA IDUL ADHA

YAYASAN PESANTREN DARUL MUSTAGHITSIN

Periode 201X

Uraian	Jumlah
Pemasukan	
Sumbangan	4.000.000
Donatur	8.000.000
Total Pemasukan	12.000.000
Pengeluaran	
Honor Bagian Perlengkapan	300.000
Honor Tukang Sembelih	-
Konsumsi Warga dan Panitia	100.000
Kambing 3 ekor	11.700.000
Total Pengeluaran	

3) Bakti Sosial

LAPORAN KEGIATAN

BAKTI SOSIAL

YAYASAN PESANTREN DARUL MUSTAGHITSIN

Periode 201X

Uraian	Jumlah
Pemasukan	
Sumbangan	4.000.000
Donatur	3.000.000
Total Pemasukan	7.000.000
Pengeluaran	
Bantuan	5.500.000
Konsumsi	500.000
Akomodasi	200.000
Bingkisan	800.000
Total Pengeluaran	7.000.000

Berdasarkan Laporan-Laporan kegiatan tersebut maka total penerimaan dan pengeluaran pada tiap kegiatan akan masuk pada laporan aktivitas yayasan pada periode tersebut.

a. Perubahan Aset Neto Terikat Temporer

Komponen ini menyajikan pendapatan dan beban yang berkaitan dengan aset neto terikat temporer. Misalnya sumbangan, penghasilan investasi, dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya aset neto terikat temporer yayasan tidak ada maka dalam laporan aktivitas ini nilainya pun tidak perlu di isi dengan kata lain di anggap Rp. 0,-

b. Perubahan Aset Neto Terikat Permanen

Komponen ini menyajikan pendapatan dan beban yang berkaitan dengan aset neto terikat permanen. Misalnya sumbangan, penghasilan investasi, dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya aset neto terikat permanen yayasan tidak ada maka dalam laporan aktivitas ini nilainya pun tidak perlu di isi dengan kata lain di anggap Rp. 0,-

Berdasarkan uraian diatas peneliti meringkas untuk laporan aktivitas yang ada di yayasan pesantren Darul Mustaghitsin adalah sebagai berikut;

LAPORAN AKTIVITAS
YAYASAN PESANTREN DARUL MUSTAGHITSIN
 Periode 201X

PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT

Pendapatan	
Madrasah Diniyah	17.000.000
PHBI Idul Adha	12.000.000
Bakti Sosial	7.000.000
Sumbangan Lain-Lain	5.000.000
Jumlah Pendapatan	36.000.000
Beban	
Madrasah Diniyah	17.000.000
PHBI Idul Adha	12.000.000
Bakti Sosial	7.000.000
Listrik dan Air	-
Honor Karyawan	4.800.000
Jumlah Beban	40.800.000
Kenaikan/Penurunan aset neto tidak terikat	200.000

PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER

Sumbangan	<u>XXX</u>
Penghasilan Investasi	<u>XXX</u>
Kenaikan/Penurunan aset neto terikat temporer	XXX

PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN

Sumbangan	<u>XXX</u>
Penghasilan Investasi	<u>XXX</u>
Kenaikan/Penurunan aset neto terikat permanen	XXX

KENAIKAN ASET NETO	XXX
ASET NETO AWAL TAHUN	<u>XXX</u>
ASET NETO AKHIR TAHUN	XXX

4.2.3. Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas ini terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Realita yang ada yayasan pesantren Darul Mustaghitsin belum membuat laporan arus kas, dimana arus kas berasal dari semua aktivitas baik aktivitas operasi, aktivitas investasi maupun aktivitas pendanaan. Maka yang harus di siapkan adalah mencari berapa arus kas dari masing-masing aktivitas.

Laporan arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari beberapa komponen, diantaranya kas dari pendapatan jasa, kas dari pemberi sumber daya, penerimaan lain-lain, kas yang di bayarkan kepada karyawan. Laporan arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari beberapa komponen, diantaranya pembelian peralatan, pembelian investasi.

Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari beberapa komponen, diantaranya investasi bangunan, investasi perjanjian tahunan. Dari uraian diatas peneliti menarik ringkasan untuk laporan arus kas yayasan pesantren Darul Mustaghitsin adalah sebagai berikut;

LAPORAN ARUS KAS
YAYASAN PESANTREN DARUL MUSTAGHITSIN
 Periode April 2015

AKTIVITAS OPERASI

Kas dari Pendapatan Jasa	XXX
Kas dari pemberi sumber daya	XXX
Penerimaan lain-lain	XXX
Kas yang dibayarkan kepada karyawan	XXX

AKTIVITAS INVESTASI

Pembelian peralatan	XXX
Pembelian investasi	XXX

AKTIVITAS PENDANAAN

Investasi bangunan	XXX
Investasi perjanjian tahunan	XXX
Kenaikan/Penurunan Neto dalam Kas dan Setara Kas	XXX
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	XXX
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	XXX

4.2.4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan yang ada di lembaga nirlaba menyajikan informasi yang belum disajikan di laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas. Misalnya informasi tentang penyusutan aset tidak lancar yang dimiliki yayasan.

Informasi yang belum disajikan pada laporan keuangan yayasan pesantren Darul Mustaghitsin adalah mengenai profil, kebijakan akuntansi, pos laporan posisi keuangan, pos laporan aktivitas. Maka catatan atas laporan keuangan yang dapat dibuat oleh yayasan adalah sebagai berikut;

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
YAYASAN PESANTREN DARUL MUSTAGHITSIN
TAHUN 201X

1. Umum

Yayasan pesantren Darul Mustaghitsin dibentuk dan di notariskan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 dengan akta notaris Bambang Eko Muljono,SH.,Mhum,MMA, Nomor : C-194.HT.03.01 Th.1992

Visi Yayasan Darul Mustaghitsin adalah Bernuansa Islami, unggul dalam prestasi, menjunjung tinggi tradisi, santun dalam bersikap, diminati masyarakat dan meraih kemuliaan hidup dalam kebahagiaan masa depan.

Misi dari Yayasan darul Mustaghitsin adalah :

- a. Membina peserta didik berdasarkan keimanan dan ketakwaan.
- b. Mewujudkan tercapainya peningkatan mutu pendidikan.

- c. Mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan Iptek dan Kebudayaan.
- d. Membina akhlak dan budi pekerti.
- e. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.
- f. Menyebar semangat demokrasi secara inovatif.
- g. Mengantarkan peserta didik menggapai prestasi.
- h. Membangkitkan daya juang bagi kemuliaan hidup dan kebahagiaan masa depan.

Program Strategis

- a. Meningkatkan SDM dan fasilitas pendidikan demi tercapainya upaya peningkatan kualitas pendidikan.
- b. Mengembangkan dakwah Islamiyah di masyarakat demi terciptanya muslim taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan mumpuni, cakap dan terampil serta bertanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara.
- c. Merevitalisasi kebudayaan Islam di wilayah Yayasan demi membendung kebudayaan asing yang bertentangan dengan syari'at Islam atau kepribadian bangsa Indonesia.
- d. Membantu memberikan keringanan biaya pendidikan kepada santri yang tidak mampu.

Sesuai dengan akta notaris pada hari Kamis tanggal 10 November 2011, maka susunan organisasi Yayasan Pesantren Darul Mustaghitsin adalah sebagai berikut;

Dewan Pembina : KH Mas'ud Al Mudjenar

H. Abdul Hamid

H. Ahmad Fata'al Chuzaibad

Ahmad Makki Ulinnuha

Hj. Afifah

Dewan Pengawas : Drs. Masjudi

H. Ubaidillah

H. Ahmad Basori

H. Choirul Anam

Dewan Pengurus

Ketua : Dr H. Imam Trisno Edy, MM

Wakil Ketua : Drs H. Soemarsono

H. Achmad Anwar, SH

Ifadatul Munanah, SE

Sekretaris : Abdul Ghoni, SE

Wakil Sekretaris : Achmad Chanafi, SP

Fikriatun Nafizah, ST

Misbachul Ulum

Bendahara : Mohammad Hidayat Anwar, SH.

Wakil Bendahara : H. Mastur

Imam Baidhowi, SE.

2. Kebijakan Akuntansi

Berikut ini adalah pokok-pokok kebijakan akuntansi penting yang diterapkan oleh yayasan pesantren Darul Mustaghitsindan memberikan pengaruh terhadap penyajian posisi keuangan dan laporan aktivitas yayasan pesantren Darul Mustaghitsin;

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan yayasan disusun sesuai dengan pernyataan standart akuntansi keuangan (PSAK) nomor 45 tentang “Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba”.

b. Dasar-dasar akuntansi dan periode pencatatan

Pencatatan dan pembukuan yayasan dilakukan dengan konsep historis, dengan periode akuntansi dari 1 Januari sampai 31 Desember untuk masing-masing tahunnya.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan kas dan pengeluaran yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Arus kas disajikan menggunakan metode langsung.

c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas yayasan berupa kas kecil.

d. Pendapatan dan biaya

Pendapatan diakui pada saat kas dan setara kas telah diterima. Biaya dibebankan secara akrual basis yaitu pada saat timbul kewajiban atas transaksi.

Biaya dikeluarkan oleh yayasan dengan alokasi biaya sebagai berikut;

Tabel 4.2. Daftar Alokasi Biaya

No	Nama Kegiatan	Alokasi Penyusutan
1	Madrasah Diniyah	35 %
2	Yayasan	40 %
3	Bakti Sosial	25 %
4	PHBI Idul Adha	0 %

e. Asset tetap

Asset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Biaya penyusutan asset tetap dihitung berdasarkan metode garis lurus dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3. Daftar Tahun Perolehan Aset Tidak Lancar

No	Jenis Aset	Tahun Perolehan	Umur Manfaat
1	Peralatan	2014	4
2	Bangunan	2011	20

f. Penyusutan

Aset tidak lancar disusutkan berdasarkan alokasi pemakaian aset tersebut.

Alokasi berdasarkan tingkat pemakaian aset pada kegiatan tertentu.

Alokasi penyusutannya adalah sebagai berikut;

Tabel 4.4. Daftar Alokasi Penyusutan Aset tidak Lancar

No	Nama Kegiatan	Alokasi Penyusutan
1	Madrasah Diniyah	35 %
2	Yayasan	30 %
3	Bakti Sosial	35 %

3. Pos Laporan Posisi Keuangan

a. Kas dan Satara Kas

Kas dan setara kas per 31 Maret 2015 adalah Rp. 5.000.000,-

b. Piutang

Piutang per 31 Maret 2015 adalah Rp. 0,-

c. Perlengkapan

Perlengkapan per 31 Maret 2015 adalah Rp. 1.000.000,-

d. Aset tidak lancar

Sebagaimana telah terurai pada pembahasan laporan posisi keuangan

bahwa aset tidak lancar yang dimiliki oleh yayasan berupa;

Tabel 4.5. Daftar Aset Tidak lancar

No	Nama Barang	Harga Perolehan
1	LCD-Proyektor	5.250.000
2	Komputer	5.500.000
3	Laptop	3.200.000
4	Notebook	3.000.000
5	Sound	1.100.000
6	Kamera	1.100.000
7	CCTV	4.300.000
8	Lemari	1.500.000
9	Tanah	300.000.000
10	Bangunan	600.000.000

e. Aset Neto

Asset neto yayasan per 31 Maret 2015 adalah Rp. 929.450.000,- dimana semuanya adalah asset neto tidak terikat.

4. Pos Laporan Aktivitas

a. Pendapatan, Penghasilan, Sumbangan

Pendapatan, Penghasilan, Sumbangan yayasan untuk periode tertentu akan disajikan pada catatan atas laporan keuangan dalam pos laporan aktivitas.

b. Beban dan Kerugian

Beban dan kerugian yayasan untuk periode tertentu akan disajikan pada catatan atas laporan keuangan dalam pos laporan aktivitas.

5. Informasi Tambahan

Informasi tambahan ini menyajikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di yayasan selama periode tertentu.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “Penyusunan Laporan Keuangan dalam prespektif PSAK 45 di Yayasan Darul Mustaghitsin” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Yayasan pesantren Darul Mustaghitsin awalnya telah menyusun laporan keuangan, namun hanya sebatas penerimaan dan pengeluaran serta jumlah asset yang dimilikinya. Memang bagi yayasan hal tersebut saat ini sudah cukup, namun kedepan dengan prospek yayasan yang cerah penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan standart akuntansi menjadi langkah awal yang bagus meski membutuhkan waktu untuk adaptasi.
- b. Pertimbangan itulah yang mendorong peneliti untuk mencoba menyusun Laporan Keuangan dalam prespektif PSAK Nomor 45 di yayasan pesantren Darul Mustaghitsin. Dengan kondisi yayasan yang tidak terlalu komplek format laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 dapat di implementasikan di yayasan dengan dasar laporan posisi keuangan awal per 31 Maret 2015. Peneliti mencoba untuk menyusun format untuk laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas posisi keuangan.
- c. Akhirnya peneliti menyusun sebuah format penyusunan laporan keuangan bagi Yayasan Darul Mustaghitsin Kabupaten Lamongan, dengan melakukan

pembaruan pada laporan posisi keuangan, serta membuat laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan PSAK 45.

5.2 Saran

Setelah penelitian ini dilakukan, ada beberapa saran yang diharapkan dapat membantu kinerja yayasan:

1. Setelah penelitian ini, diharapkan yayasan tetap menyusun laporan aktivitas dan laporan arus kas periode selanjutnya sesuai dengan PSAK Nomor 45. Hal ini bertujuan agar penilaian kinerja organisasi di periode berikutnya tetap dapat dilakukan dengan baik, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan.
2. Untuk mempermudah penyusunan laporan aktivitas, sebaiknya yayasan memperjelas siklus akuntansinya, sehingga sistematis pencatatan yayasan lebih mudah dipahami dan mempermudah pencarian data jika suatu saat dibutuhkan.

Semoga format yang peneliti sajikan dapat membantu Yayasan untuk penyusunan laporan keuangan pada periode-periode yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2005, *Akuntansi Sektor Publik : Satuan Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Bastian, Indra., 2007. *Akuntansi Pendidikan*, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Carter, K. William., 2009, *Akuntansi Biaya*, Edisi 14, Buku 1, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul., 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Syafri Sofyan, 2007, *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi, Penerbit PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kieso, E. Donald, Jerry J. Weigant, dan Terry D. Warfield., 2007, *AkuntansiIntermediate*, Edisi Keduabelas, Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Nainggolan, Pahala., 2005, *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*, Penerbit PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati, 2007, *Akuntansi Pemerintah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Warren, S. Carl., James M.Reeve, dan Philip E. Fees, 2008, *Pengantar Akuntansi*, Buku Satu, Edisi 21, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Winarni, F., dan G., Sugiyarso, 2001, *Konsep dasar dan Siklus Akuntansi*, Penerbit Media Presindo, Yogyakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia, Per 1 Juli 2009, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Jakarta : Penerbit Erlangga

Beams, Floyd A. 2000. *Akuntansi Keuangan Lanjutan. Edisi Keenam. Diterjemahkan Oleh Amir Abadi Yusuf*. Jakarta : Salemba Empat.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45, Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba*. Indonesia Ikatan Akuntansi Indonesia.

Wiwin Yaadiati. 2007, *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Pertama Jakarta: Prenada Media Group.

Harahab, Sofyan Syahri. 2012, *Teori Akuntansi – Edisi Revisi 2011* Cetakan Keduabelas. PT. Radjagrafindo Persada. Jakarta.

P+A8:H37ENERIMAAN				PENGELUARAN			
No. Urut	No. Kode	Uraian	Jumlah	No. Urut	No. Kode	Uraian	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
I	1	SISA TAHUN LALU		I	1	PROGRAM PP	
					1,1	Kegiatan pembelian/pengadaan buku pelajaran	3.450.000,00
II	2	PENDAPATAN RUTIN			1,2	kegiatan Penerimaan Sa Baru (PSB)	-
	2,1	Iuran Santri tiap bulan	2.900.000,00	a	1,3	Kegiatan pembelajaran (Proses Belajar Mengajar)	750.000,00
	2,2	Donatur	4.000.000,00		1,4	Kegiatan Ulangan (Semester dll)	1.000.000,00
	2,3	Sumbangan Masyarakat	-		1,5	Kegiatan Pembelian ATK (bahan habis pakai)	3.000.000,00
	2,4				1,6	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	4.750.000,00
III	3				1,7	Operasional & Manajemen Sekolah	6.650.000,00
	3,1	total sumbangan	24.000.000,00		1,8	Pembinaan kesiswaan/ekstrakurikuler	2.000.000,00
	3,2		-	II	2	NON PROGRAM PP	
IV	4	BANTUAN			2,1	Belanja Pegawai	7.350.000,00
	4,1	Dana dekonsentrasi	-		2,2	Belanja Barang dan Jasa (Listrik, Telpon)	1.150.000,00
	4,2	Dana Tugas Pembantuan	-		2,3	Peningkatan Mutu Pendidik (Pelatihan, Penataran)	800.000,00
	4,3	Dana Alokasi Khusus	-		2,4		
	4,4	Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)*	-		2,5		
Jumlah Penerimaan			30.900.000,00	Jumlah Pengeluaran			30.900.000,00

* Sebutkan jika ada

Mengetahui,
Pengurus Madrasah Diniyah

Menyetujui,
Kepala Madrasah Diniyah
Wustho PP. Darul
Mustaghitsin

Lamongan, 15 Agustus 201

Dibuat
Bendahara

DR. H. IMAM TRISNO EDY, MM

ABDUL GHONI, SE.MM

SYAIFUL ARIF